

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KUALA
TERENGGANU TENTANG PENGESAHAN TARAF ANAK
PADA KASUS NOMOR 11300-006-0033-2012 DITINJAU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S. Sy)**



Oleh :

NUR AZZAH BINTI WAHID

NIM : 10821004967

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAUMAWA 2013 M/1434 H**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur adalah milik Allah SWT yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan manusia tersebut adalah karunia fikiran dan kecerdasan, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat baginda. Karena baginda adalah sosok yang telah berjasa memberi bimbingan terhadap aktualisasi pikiran dan kecerdasan kepada manusia yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Sesungguhnya di dalam menyelesaikan penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis menghadapi ujian dan rintangan akibat dari beratnya topik pembahasan yang diteliti, namun penulis akhirnya memperoleh inspirasi dari beberapa individu yang sentiasa mendukung dan memberi semangat sepanjang penulisan skripsi ini. Penulis berhasil menyiapkan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KUALA TERENGGANU TENTANG PENGESAHAN TARAF ANAK PADA KASUS NOMOR 11300-006-0033-2012 DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Adapun di kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat yang mendalam serta terima kasih kepada :

1. Buat Ayahanda Wahid Mohd dan Almarhumah Bonda Rosnah Rasyid yang tercinta dan tersayang yang telah mendidik dan membesarkan

anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta adik-beradik dan keluarga penulis yang penulis kasihi terutama Nur Azlinie, Nur Afieda, Nur Aziera, Muhammad Ashraff, Muhammad Aizuddien dan Muhammad Afif Nazran.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. M. Nazir karena telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyambung perkuliahan di sini.
3. Bapak Dekan dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memudahkan urusan penulis sepanjang perkuliahan.
4. Bapak Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN SUSKA.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili M.Ag, yang merupakan Dosen Pembimbing penulis dalam menyiapkan penulisan skripsi ini.
6. Hakim dan seluruh kakitangan Mahkamah Syariah Kuala Terengganu yang telah membantu penulis untuk mendapatkan maklumat dan informasi sama ada secara langsung maupun tidak langsung.
7. Secara khusus ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada teman-teman yang telah memberi sokongan dan galakan, begitu juga kepada Hanim Shafiera, Amanina dan Abdul Syukur yang sentiasa memberi sokongan dan galakan, teman-teman se-Indonesia dan mahasiswa Malaysia di Pekanbaru, teman-teman jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang banyak membantu memudahkan urusan penulis,

teman-teman se-fakultas Syariah, kasih sayang dan perhatian mereka telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, penulis hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari pelbagai pihak, terutama ahli akademik.

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan terima kasih semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 10 Juni 2013

Penulis

NUR AZZAH BINTI WAHID

NIM : 10821004967

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Putusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu Tentang Pengesahan Taraf Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) tempat di mana penulis menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Dalam skripsi ini, penulis memaparkan tentang pensabitan nasab anak menurut Hukum Islam dan aplikasi putusan hakim tentang pengesahan nasab anak pada kasus yang diteliti penulis yaitu pensabitan nasab anak yang kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah kedua orang tuanya. Hakim memberi konfirmasi nasab pada pemohon tersebut meskipun anak tersebut kurang dari masa enam bulan sejak akad nikah kedua orangtuanya sampai dia dilahirkan. Penulis menganalisa alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam terhadap fakta permasalahan tersebut. Oleh karena permasalahan ini sangat jarang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk karya ilmiah, guna melihat fakta permasalahan nasab anak ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena kasus yang diteliti oleh penulis hanya satu, dan jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, maka semuanya dijadikan sampel. Hal ini merupakan sumber data yang bersifat primer. Adapun sumber data yang bersifat sekunder dalam penelitian ini adalah literature pustaka. Penulis mengambil data yang diperlukan dengan beberapa metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan antaranya suami dan istri serta pihak-pihak lain sebagai informasi antaranya para hakim, panitera, asisten panitera dan staf-staf mahkamah yang lain. Penulis mengambil juga dokumentasi yaitu dengan mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang terkait dengan permohonan pengesahan nasab anak tersebut di Mahkamah Tinggi

Syariah Kuala Terengganu. Bagi studi kepustakaan, penulis menelaah buku-buku yang terkait dengan persoalan yang diteliti.

Setelah dilakukan analisa dengan Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan putusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu tentang pengesahan nasab anak adalah tidak sesuai dengan hukum Syara' karena hakim hanya mengambil pendapat yang tidak *rajih* sebagai alasan dan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAKiv

DAFTAR ISIvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II GAMBARAN MAHKAMAH SYARIAH TERENGGANU

A. Latar Belakang, Sejarah Mahkamah Syariah.....	17
1. Zaman Penjajahan Bagian Pertama.....	17
2. Zaman Penjajahan Bagian Kedua.....	20
3. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syariah di Malaysia.....	22
B. Sejarah Berdirinya Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.....	24

C. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.....	32
D. Misi, Visi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu...	34
E. Perakuan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.....	37
F. Pelaksanaan Pengadilan di Mahkamah Syariah.....	39
G. Kompetensi Absolute Mahkamah Syariah.....	43
H. Piagam Pelanggan Mahkamah Syariah.....	45

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB ANAK

A. Pengertian Nasab	47
1. Nasab Dari Segi Bahasa	47
2. Nasab Dari Segi Istilah	50
B. Dasar Hukum.....	52
C. Pendapat Ulama' Mengenai Status Anak Zina.....	55
D. Penetapan Adanya Nasab.....	58
1. Batas Minimal Masa Kehamilan.....	58
2. Batas Maksimal Masa Kehamilan.....	61
E. Keharusan (Kewajiban) Memelihara Nasab.....	65
1. Pemeliharaan Nasab Satu Tujuan Hukum Islam.....	65
2. Larangan Adopsi Secara Mutlak.....	66
3. Larangan Mengingkari Nasab Anak.....	68
4. Menyandarkan Nasab Kepada Selain Ayahnya.....	70
F. Tes DNA Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab.....	71
G. Akibat Hukum Anak Zina.....	74
H. Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-undang Pentadbiran Keluarga	

Islam Terengganu Tentang Kesahtarafan Anak.....	77
---	----

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENGESAHAN NASAB ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Putusan Hakim Tentang Pengesahan Nasab Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012.....	78
B. Alasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Tentang Masalah Nasab Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012.....	85
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Tentang Pengesahan Nasab Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci (fitrah) tanpa adanya dosa atau kesalahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه.¹ (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a, ia telah berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah (suci atau asli), maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu beragama Yahudi dan Nashrani" (HR. Bukhari).

Maksud hadits di atas menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci ibarat kain putih yang tidak bernoda sedikitpun, maka tugas kedua orang tua lah yang mencorakkan warnanya.

Anak-anak adalah anugerah yang sangat berharga yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada suami istri, ia adalah pengikat kasih sayang dan kemesraan di

¹ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ath-Thalaq*, (Beirut : Dar Ash-Sha'bi, t.t), h. 82.

dalam sebuah keluarga. Ibu bapalah yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan didikan anak tersebut menjadi insan yang berguna.

Kelahiran anak-anak ini apakah melalui ikatan perkawinan yang sah yang dikenal sebagai anak yang sah taraf atau melalui hubungan yang haram yang dikenal sebagai anak luar nikah atau anak tidak sah taraf.² Bagi anak yang sah mereka sudah tentu memiliki beberapa hak dan keistimewaan tertentu terutama sekali hak nasab yang sah. Sedangkan bagi anak yang tidak sah atau anak dari hasil zina, kelahiran mereka tentu saja akan mengundang pelbagai pandangan negatif terhadap mereka. Mereka dipandang hina dan sering dipersalahkan atas kelahiran tersebut. Kondisi ini tentu saja akan memberi sedikit tekanan pada mereka.

Dewasa ini kelahiran anak hasil zina semakin menjadi-jadi di dalam masyarakat akibat dari berbagai masalah sosial seperti pergaulan bebas kaum muda-mudi, perbuatan pemerkosaan dan perbuatan sumbang mahram.³

Dalam pembahasan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia anak yang dilahirkan oleh wanita itu dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu anak yang sah taraf menurut aturan syari'at dan anak yang tak sah taraf (anak zina). Meskipun Islam membagi anak yang dilahirkan tersebut menjadi dua kategori seperti yang dijelaskan di atas, akan tetapi tidaklah berarti Islam memandang anak

² Sah menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga terbitan Dewan bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur adalah lulus pada sisi undang-undang (adat, hukum, dan lain-lain), lawan batal, benar, pasti dan nyata. Taraf pula bermaksud tinggi rendahnya atau buruk baiknya (nilai sesuatu), darjat, mutu, tingkatan kedudukan dalam masyarakat, martabat dan peringkat. Sah taraf anak bermaksud kedudukan anak dari segi syara'.

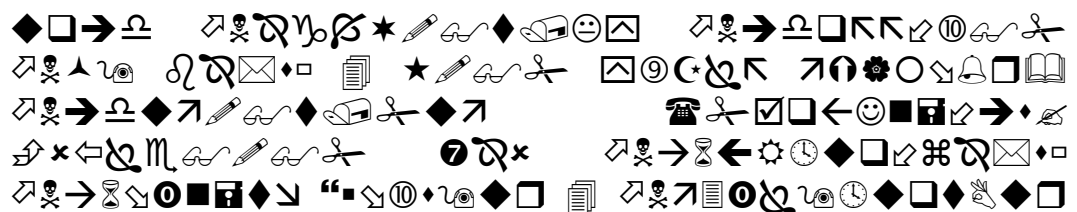
³ Sumbang mahram adalah perbuatan zina yang dilakukan dengan orang yang tidak boleh dikahwini seperti ibu, saudara perempuan sekandung, nenek dan ibu saudara.

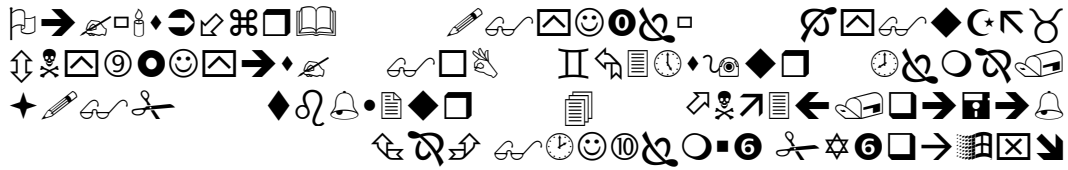
yang lahir dari hubungan yang tidak sah tersebut pada posisi yang hina dan keji serta melebihi anak dilahirkan secara sah.

Ibnu Hazim seorang ahli filsafat Islam abad ke-5 mengemukakan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak dari hasil zina dapat diterima sekalipun dalam kasus perzinahan itu sendiri. Selanjutnya, anak tersebut bila sudah baligh dapat diangkat sebagai hakim. Keberadaan anak tersebut sama halnya dengan anak-anak lain. Bahkan Al-Qur'an sekalipun tidak membedakannya dengan seorang muslim yang lain.

Persoalan anak zina yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut syara', berarti anak yang dikandung dalam rahim seorang wanita hasil dari zina atau persetubuhan secara haram yang dilakukan oleh ibunya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya di mana mereka melakukan atas dasar kerelaan di antara mereka, tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak atau bukan karena keterpaksaan.

Sesungguhnya Islam sangat memperhatikan nasab seseorang manusia agar bersih dan tetap terjaga kebersihan nasab itu. Peletakan nama bin (anak laki-laki) dan binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya setelah nama anaknya adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi :





Artinya :

Panggillah anak-anak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada bapa-bapa mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui ayah mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai "maula-maula" kamu. Dan kamu tidak dihitung berdosa dalam hal yang kamu keliru melakukannya, tetapi (yang dihitung berdosa itu adalah perbuatan) yang disengaja oleh hati kamu melakukannya. Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Di dalam ayat itu Allah SWT meminta agar setiap anak dinisbahkan kepada ayahnya tidak kepada ibunya, sehingga disebut fulan bin fulan tidak fulan bin fulanah. Ketika seseorang disebut atau dipanggil ia juga dipanggil dengan, “Wahai bin fulan,” tidak “Wahai bin fulanah.” Pada hari kiamat pun manusia akan dipanggil dengan namanya yang dinisbahkan kepada ayahnya, fulan bin fulan, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, ‘Sesungguhnya seorang pengkhianat akan mengangkat sebuah panji untuknya pada hari kiamat’. Dikatakan kepadanya, “Inilah pengkhianatan fulan bin fulan”. (HR. Bukhori)⁴

Ibnu Batthol mengatakan, ‘Panggilan dengan ayahnya lebih senang dikenal dan lebih mengena untuk membezakannya dengan orang lain’.

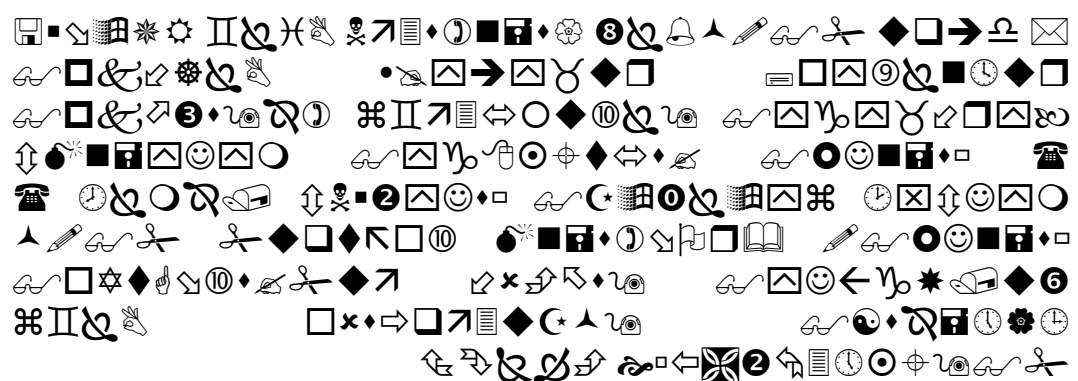
Penisbahan seorang anak kepada ayahnya ini karena ayahnya adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya baik di dalam maupun di luar rumah. Dari

⁴ “Nasab – Wikipedia Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas”, diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasab>.

itu, Islam memandang bahwa pernikahan adalah jalan yang mulia untuk menjaga kemurnian nasab seseorang agar tetap bersih dan suci. Pernikahan adalah suatu risalah Islam yang suci dan mulia. Maka penyimpangan terhadapnya merupakan hal yang sangat dilarang dan dicela dalam Islam.

Di negara bagian Terengganu adanya Peradilan Agama dalam memutuskan keputusan peradilan, yaitu Mahkamah Syariah Terengganu dan hukumnya meliputi wilayah daerah-daerahnya, yang dipandu berdasarkan Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu.⁵

Dalam menafsirkan nasab, Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu Tahun 1985, bagian 2, menyebut : ‘Nasab’ artinya keturunan melalui pertalian darah yang sah menurut hukum Syara’. Merujuk kepada sumber utama hukum Syara’ mengenai persoalan nasab ini, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-A’raf ayat 189 yang berbunyi :

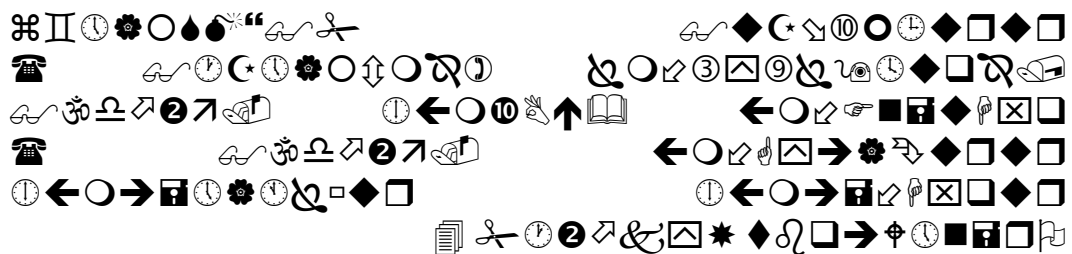


Artinya :

⁵ Enakmen merujuk kepada proses undang-undang atau sebahagian daripadanya, dan perjanjian menjadi satu penguatkuasaan undang-undang.

Dia lah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri suami istri), untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencampuri istrinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan, serta teruslah ia dengan kondisi itu (ke suatu waktu). Kemudian ketika ia merasa berat (dan menaruh khawatir) berdoalah suami istri itu kepada Tuhan mereka (dengan mengatakan): "Sesungguhnya jika Engkau (Ya Tuhan kami) memberi kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur".

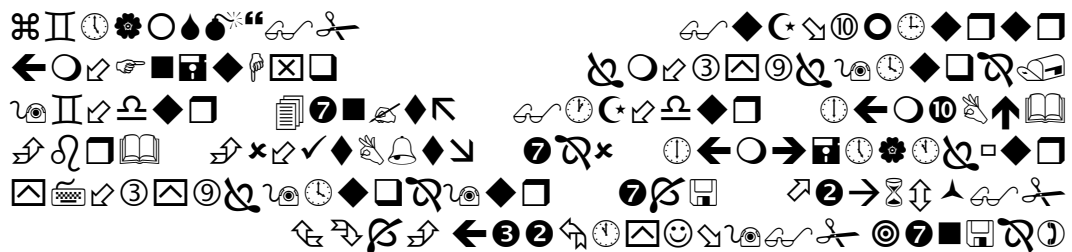
Allah SWT berfirman lagi di dalam surah Al-Ahqaaf ayat 15 :



Artinya :

Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang masa mengandungnya beserta dengan periode menceraikan susunya adalah dalam waktu tiga puluh bulan.

Dalam ayat yang lain, dalam surah Luqman ayat 14 Allah SWT berfirman:



Artinya :

Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal kehamilan sampai akhir menyusunya), dan

periode menceraikan susunya adalah dalam waktu dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan).

Ayat 15 Surah Al-Ahqaaf di atas menjelaskan selama kehamilan sampai waktu menceraikan susu adalah tiga puluh bulan, sementara ayat 14 Surah Luqman pula menjelaskan bahwa periode menceraikan susu ialah dua tahun yaitu dua puluh empat bulan. Oleh yang demikian tempoh sependek-pendek hamil atau mengandung yang diakui oleh hukum Syara' adalah enam bulan.

Di dalam kitab *Bughyat al-Mustarshidin*, oleh al-Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, dikenal dengan nama Ba'lawy, Mufti Negara Hadralmaut disebutkan ;⁶

نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لسته أشهر
ولحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه

Artinya :

“Seorang perempuan hamil dari perbuatan zina, kemudian dia melangsungkan akad nikah perkawinan dengan seorang pria. Dalam perkawinan tersebut, suaminya itu berupaya tinggal bersamanya sebagai suami istri, lalu dalam waktu enam bulan dua detik (lahzoh) dari tanggal akad nikah perkawinan mereka, perempuan tersebut melahirkan anak, dalam hal suaminya itu berupaya melakukan persetubuhan dengannya, maka anak tersebut harus dinasabkan kepada pria yang menjadi suaminya itu.”

⁶ Sayyid Abdul Rahman, *Bughyat al-Mustarshidin*, (Darul Fikr, t.t), h. 242.

Untuk merealisasikan ketentuan hukum Syara' itu, Pasal 109 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu 1985 mengalokasikan –

“Jika seorang perempuan yang berkawin dengan seorang pria melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari tanggal perkawinan itu, atau dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh hukum Syara' setelah perkawinan itu dibubarkan apakah oleh sebab kematian pria itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkawin kembali, maka pria itu akan dianggap sebagai ayah anak itu, tapi pria itu dapat menyangkal, dengan cara *li'an* mengikut hukum Syara', bahwa anak itu adalah bukan anaknya”.⁷

Hukum hanya mengatur, “Jika seorang perempuan yang berkawin dengan seorang pria melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari tanggal perkawinan itu, maka orang itu akan dianggap sebagai ayah anak itu. Dari perspektif hukum Syara' pula ia memberikan tambahan syarat kepada kelahiran dalam enam bulan dua detik (*lahzoh*) dari tanggal akad nikah perkawinan dengan dua syarat. Syarat pertama ialah dalam perkawinan tersebut, suami berupaya tinggal bersama istrinya itu sebagai suami istri. Syarat kedua suami tersebut berupaya melakukan persetubuhan dengan istrinya itu”.⁸

Seperti pada kasus nomor 11300-006-0033-2012 antara Zafrin Zulhilmi bin Pauzi (pemohon) dan Noor Aini binti Nasron (respondan), hakim telah menetapkan bahwa bayi yang telah dilahirkan oleh respondan yang diberi nama Nur Damia Aqilla binti Abdullah menjadi anak kepada Zafrin Zulhilmi bin Pauzi. Syarat pertama dan kedua seperti yang dijelaskan di atas terpenuhi oleh pemohon namun dalam hitungan tanggal akad nikah pemohon dan respondan dengan tanggal lahir bayi tersebut, di sini penulis temukan saat bayi tersebut berada di dalam kandungan ibunya setelah akad nikah dan tanggal lahirnya tidak sesuai tuntutan Syara' yaitu selama enam bulan dua detik (*lahzoh*). Pemohon dan

⁷ Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu 1985, Pasal 109, *Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001*, (Terengganu : Percetakan Nasional Malaysia Berhad Cawangan Terengganu, 2001), h. 21.

⁸ *Ibid.*

respondan menikah pada tanggal 1 Jamadil Awwal 1431 bersamaan 16 April 2010 dan tanggal lahir bayi mereka adalah pada 3 September 2010. Usia kandungan tersebut hanya berusia empat bulan 24 hari dari waktu akad nikah pemohon dan respondan sehingga dia dilahirkan. Dalam kasus ini hakim memutuskan bayi tersebut menjadi anak kepada Zafrin Zulhilmi bin Mohd Pauzi (Pemohon) dan harus didaftarkan oleh Pendaftar Kelahiran dan Kematian Terengganu.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih mendalam permasalahan tersebut dengan meletakkan judul : **“Putusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu Tentang Pengesahan Taraf Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis membatasi lingkup permasalahannya kepada aplikasi putusan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu, Malaysia dalam memberi wewenang konfirmasi taraf anak menurut hukum Islam. Penulis hanya meneliti hal yang sudah diputuskan hakim dari Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengingat pembatasan masalah seperti yang disebutkan sebelumnya, maka perumusan masalah disusun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu mengenai pengesahan nasab anak dalam kasus nomor 11300-006-0033-2012 tentang permohonan pengesahan taraf anak?
2. Apa alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu 1985 bagian 2?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk deskripsikan putusan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu mengenai pengesahan nasab anak dalam kasus nomor 11300-006-0033-2012 tentang permohonan pengesahan taraf anak.
2. Mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu 1985 bagian 2.

Berikut manfaat yang dapat dikutip dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui dan lebih memahami problematika seputar konfirmasi taraf anak dan aplikasi putusan hakim terhadap permasalahan tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu.
2. Dapat memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum, terutama tentang kasus konfirmasi taraf anak dan undang-undang negara bagian Terengganu, Kuala Terengganu khususnya.
3. Untuk merealisasikan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Keilmuan dan Penelitian.
4. Dapat menambah wawasan ilmu dalam wilayah kajian dan kontribusi penulis terhadap pengetahuan umum yang erat kaitannya dengan program studi *Ahwal Al-Syakhsiyyah* dan menambah literatur kepustakaan.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi kawasan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu, Terengganu untuk menyelesaikan dan menetapkan putusan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara yang beragama Islam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim dan suami istri yang berperkara.
- b. Objek dalam penelitian adalah putusan hakim tentang pengesahan taraf anak di daerah wewenang Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu yang kurang dari enam bulan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang ada dalam penelitian ini orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yaitu 1 orang suami, 1 orang istri, 3 orang hakim, panitera, dan asisten panitera. Oleh karena jumlahnya tidak terlalu banyak maka semua dijadikan sampel.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer : Yaitu data yang diperoleh dari responden yaitu suami istri yang membuat permohonan untuk kofirmasi taraf anak di kawasan kewenangan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu dan hakim yang memutus.

- b) Data Sekunder : Yaitu data yang diperoleh dari literature-literature yang tersedia, instansi-instansi terkait, hakim di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu, kitab-kitab fikih serta buku-buku yang lain memungkinkan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada suami istri, hakim, panitera, asisten panitera, dari pertanyaan terkait konfirmasi status anak.
- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang ada kaitan dengan konfirmasi taraf anak di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam. Penulis menerapkan metode analisa ini, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian

rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.⁹

7. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Deskriptif Analisa, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut :

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, Agustus 2006), Cet. ke-13, h. 15.

BAB I : Pada awal bab ini penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Penulis membahas gambaran umum latar belakang Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu yang berisi tentang sejarah, lokasi dan posisi, misi, visi, objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, pelaksanaan pengadilan di mahkamah, Kompetensi Absolute Mahkamah Syariah dan struktur organisasi.

BAB III : Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang teori mengenai nasab atau sah taraf anak dalam hukum Islam, yaitu pengertian nasab, dasar hukum, pendapat ulama' mengenai status anak zina, penetapan adanya nasab, keharusan (kewajiban) memelihara nasab, tes DNA sebagai alat bukti hubungan nasab, akibat hukum anak zina dan Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu tentang kesahtarafan anak.

BAB IV : Pada bab ini pembahasan tentang analisis hasil penelitian yaitu aplikasi putusan hakim terhadap konfirmasi taraf anak, alasan dan pertimbangan hakim dalam mengambil

putusan tentang masalah nasab anak tersebut serta tinjauan hukum Islam mengenai aplikasi pemberian konfirmasi taraf anak tersebut.

BAB V : Adalah bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan penulis pada pihak-pihak tertentu.

BAB II

GAMBARAN MAHKAMAH SYARIAH TERENGGANU

A. Latar Belakang, Sejarah Mahkamah Syariah

1) Zaman Penjajahan Bagian Pertama

Tidak dapat disangkal bahwa kedatangan penjajah Inggris dan campur tangannya di Tanah Melayu adalah bertujuan untuk menguasai ekonomi, politik, administrasi dan hukum serta menyebarkan agama Kristen di negara ini. Penjajah Inggris menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786, Singapura 1819 dan Malaka pada tahun 1824.¹⁰

Setelah itu, dengan perjanjian bahwa sultan setuju menerima seorang Residen British yang akan menasihati sultan dalam semua hal berhubungan dengan pemerintahan kecuali dalam hal yang terkait dengan agama dan adat orang-orang Melayu, nasihat Residen British ini harus diikuti oleh sultan, penjajah Inggris memasuki negeri Perak mulai 20 Januari 1874, negeri Selangor mulai Agustus 1874, menyatukan kesembilan negeri di dalam satu federasi pada tahun 1895 di bawah pemerintahan Yang DiPertuan Besar dan seorang Residen Inggris sebagai penasihat di Negeri Sembilan, dan dalam tahun 1888 di negeri Pahang. Penjajah Inggris kemudian bertindak campur tangan (intervensi) di negeri-negeri

¹⁰ *Zaman Penjajahan*, Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, diakses pada 5 Januari 2013 dari <http://www.jkstr.gov.my>.

Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu melalui Perjanjian Bangkok pada 9 Juli 1909.¹¹

Melalui perjanjian tersebut, Pemerintah Siam memindahkan segala hak kekuasaannya atas empat buah negeri itu kepada Inggris, sementara Pattani diserahkan kepada Siam. Pada tahun 1914 negeri Johor pula menerima Penasihat Inggris. Dengan demikian sempurna sudah seluruh Tanah Melayu, selain Pattani, dijajah oleh Inggris.

Menurut pakar hukum, penjajah Inggris menolak hukum Islam dan adat Melayu dan menggantinya dengan hukum Inggris di Tanah Melayu (yang telah dijajah itu) adalah dengan dua cara, yaitu pertama dengan mengadakan hukum yang memerlukan hukum Inggris itu diikuti dan yang keduanya dengan mengadakan pengadilan dipimpin oleh hakim yang dapat mengatur dan ada kalanya memasukkan hukum Inggris.¹²

Di Terengganu, usaha penjajah Inggris menerapkan hukum Inggris dan mengesampingkan hukum Islam yang telah dilaksanakan di negeri ini berawal sejak Inggris mendirikan *Joint Court* yang diketuai oleh *British Agent* untuk membicarakan, diduga, kasus-kasus yang berkaitan dengan orang-orang Inggris atau warga negara Inggris saja. Ada juga hakim-hakim dari bangsa Melayu yang ditunjuk bertugas di mahkamah *Joint Court* ini. Pengadilan ini memiliki

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

kewenangan membicarakan kasus-kasus yang berhubungan dengan kesalahan jinayah (pidana) dan tuntutan sipil (perdata).¹³

Penjajah Inggris juga telah membuat tanggapan bahwa hukum Islam yang ada dan berjalan di Terengganu pada saat itu sebagai “*The Impractical Requirements of Muhammadan Law*” dan sulit dilaksanakan. Penjajah Inggris berpendapat hukum Islam tersebut harus diganti dengan hukum Inggris.

Ketika negeri Terengganu di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah (1920 -1942), atas saran Penasihat Inggris, beberapa perubahan struktur organisasi dan kewenangan Departemen Agama Islam Negeri telah dibuat serta perjalanan hukum telah diganti dengan hukum Inggris, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga orang-orang Islam.¹⁴

Kegagalan umat Islam menentang masuknya hukum Inggris dan pelaksanaannya di Tanah Melayu ini pada umumnya dan negeri Terengganu khususnya telah meninggalkan kesan yang besar pada posisi hukum Islam di negara ini. Berikut adalah antara efek negatif penjajahan barat terhadap hukum Islam ¹⁵:

1. Ada dualisme dalam sistem hukum di Malaysia yaitu Sipil dan Syariah.

¹³ Syahrul Zaman, *Zaman Pra-Sejarah Negara*, (Kuala Lumpur : TATI Education, 2002), h. 26.

¹⁴ *Ibid*, h. 28.

¹⁵ Sabariah Sambak, *Pengaruh Penjajahan*, (Terengganu : Percetakan Nasional Berhad, 2004), h. 42.

2. Mahkamah Syariah dikeluarkan daripada hirarki Pengadilan Federal dan ditempatkan di bawah kekuasaan negeri.
3. Hukum Federal telah membatasi kekuasaan Mahkamah Syariah.
4. Hukum British digunakan sepenuhnya dalam Pengadilan Sipil.
5. Hukum Islam dibatasi kewenangannya hanya dalam hal kekeluargaan, pewarisan dan kesalahan jinayah yang terbatas.
6. Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam negeri memiliki kekuasaan yang terbatas.
7. Hukum Inggris telah mempengaruhi Sistem Kehakiman.

2) Zaman Penjajahan Bagian Kedua

Posisi administrasi agama dan hukum Islam tidak banyak mengalami perubahan ketika zaman penjajahan Jepang (1942-1945). Penjajah Inggris terus berkuasa di Tanah Melayu setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Tindakan Inggris yang paling efektif adalah mengubah struktur pemerintahan agama Islam dan hukum Islam yang dulunya ada, dengan mendirikan Majlis (Dewan) Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, serta membuat hukum yang memiliki kewenangan yang terbatas untuk dilaksanakan di Mahkamah Qadi sesuai kehendak penjajah Inggris itu sendiri.¹⁶ Hukum Inggris dilakukan di pengadilan umum yang mana kewenangannya meliputi semua orang, baik Islam atau pun bukan Islam. Kewenangan pengadilan umum ini melebihi kewenangan Mahkamah Qadi, bahkan jika terjadi perselisihan antara hukum Islam dengan

¹⁶ *Ibid*, h. 57.

hukum Inggris, meskipun di dalam kasus yang melibatkan orang Islam, maka hukum Inggrislah yang dipakai. Sebelum tahun 1948, Mahkamah Qadi telah ditempatkan di dalam struktur peradilan. Susunan pengadilan-pengadilan untuk administrasi undang-undang *mal* dan jinayah adalah seperti berikut yaitu Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Magistret Kelas Pertama, Mahkamah Megistret Kelas Kedua, Mahkamah Qadi dan Mahkamah Penghulu.¹⁷

Pada tahun 1948, melalui *Courts Ordinance*, pemerintah British telah mendirikan sistem peradilan (publik) untuk Federal dan telah meninggalkan Mahkamah Qadi. Dengan demikian, melalui *Courts Ordinance* ini, Mahkamah Qadi dipisahkan dari pengadilan umum.

Sebuah konstitusi tertulis telah dibuat untuk menjadi dasar pemerintahan Federal Tanah Melayu. Konstitusi Federal itu berlaku mulai 1 Februari 1948. Konstitusi Federal menyatakan bahwa konstitusi ini adalah hukum utama Federasi dan apa-apa hukum yang disetujui setelah Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan konstitusi ini harus dibatalkan. Tanah Melayu diakui merdeka pada 31 Agustus 1957.¹⁸

Setelah Malaysia didirikan pada 16 September 1963, Konstitusi Federal meliputi Sabah dan Sarawak. Konstitusi Federal menggambarkan kewenangan

¹⁷ Rafiah Salim, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 35.

¹⁸ *Ibid*, h. 37.

Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah diletakkan di bawah kewenangan negeri.¹⁹

3) Sejarah Berdirinya Mahkamah Syariah di Malaysia

Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam untuk kesalahan sipil dan jinayah agama sesuai kewenangan yang dialokasikan untuknya.²⁰

Pada tahun 1948, peraturan Mahkamah Agung dan sistem peradilan Federal memisahkan Mahkamah Syariah dari hierarki pengadilan. Pada masa pemerintahan kekuasaan asing, segala urusan agama diberi kepada raja-raja Melayu tetapi terhadap bidang yang terbatas seperti perkawinan, adat istiadat dan agama. Pada tahun 1952, negeri Selangor Darul Ehsan yang pertama sekali membuat Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syara', kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain di Malaysia Barat.²¹

Sultan merupakan Ketua Konstitusi Negeri di Negara Bagian masing-masing. Di bawah Konstitusi Negeri, kekuasaan legislatif dimiliki oleh Dewan Undangan Negeri yang melantik anggota Dewan untuk membentuk Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO).²² EXCO yang dipimpin oleh Menteri Besar, memegang kekuasaan eksekutif dan merupakan badan yang membuat kebijakan pemerintah negeri. Menteri Besar yang ditunjuk oleh Sultan adalah dari partai politik yang memenangkan kursi terbanyak di dalam Dewan Undangan hasil Pemilihan

¹⁹ *Ibid*, h. 38.

²⁰ Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 24 Januari 2013.

²¹ *Ibid*.

²² EXCO adalah Majelis Eksekutif Negeri yang mempunyai tanggungjawab untuk menasehati Raja atau Yang di-Pertua Negeri dalam menjalankan tugas eksekutif mereka.

Umum (PEMILU).²³ Maka Sultan bagi setiap negeri di Malaysia ditunjuk sebagai Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap administrasi agama Islam. Sedangkan bagi negeri yang tidak memiliki institusi beraja seperti Malaka, Pulau Pinang, Sarawak, Wilayah Persekutuan dan Sabah, Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap administrasi agama Islam adalah Yang Di Pertuan Agung. Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai lembaga tertinggi (pembuat kebijakan) dan diikuti Majlis Agama dan Adat Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam.²⁴

Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Qadi untuk menjalankan peraturan dan ketentuan hukum administrasi Agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri didirikan sebuah Departemen Agama Islam untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum di bawah ketentuan administrasi agama Islam. Mahkamah Syariah adalah salah satu badan penting yang berada di bawah administrasi Departemen Agama Islam di setiap negeri. Mahkamah Syariah juga didirikan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan menjalankan pemerintahan agama Islam. Kepala untuk setiap daerah tersebut ditunjuk seorang Qadi Daerah.²⁵

Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang terpisah dengan Kantor Agama. Kantor Agama menjalankan pemerintahan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat, *baitulmal*, dakwah, pendidikan, manajemen masjid dan sebagainya sesuai kekuasaan bagi setiap negeri tersebut di Malaysia. Saat ini semua Mahkamah Syariah telah

²³ “*Sejarah, Geografi, Penduduk Malaysia*”. Diakses pada 24 Januari 2013 dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia_files/ads_002.html.

²⁴ Rafiah Salim, *Op. Cit*, h. 51.

²⁵ Ensiklopedia Bebas, *Op.cit*, 24 Januari 2013.

terpisah pemerintahannya dengan Departemen Agama Islam. Mahkamah Syariah telah diubah identitasnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri.

B. Sejarah Berdirinya Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Di negara bagian Terengganu, Departemen Agama Islam bagi negeri tersebut dikenal dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT). Berdasarkan ketentuan Konstitusi Federal yang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri mengenai keanggotaan, susunan dan pengaturan Mahkamah Syariah, maka Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR) harus didirikan secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Akibat dari itu, melalui Kebenaran Personalial Negeri Terengganu Bilangan 2/1988, JKSTR diasingkan dari JHEAT berlaku mulai 1 Januari 1988.²⁶

Sebelum tahun 1988, Mahkamah Syariah di Terengganu adalah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan di dalam Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Mahkamah Syariah di Negeri Terengganu ini mulai 1 Agustus 1987 telah disusun dalam tiga tingkat yaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah.²⁷ Meskipun begitu, di Kuala Terengganu yang mana ditempatkan Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, *court house*-nya hanya satu sahaja yang dapat diadakan. Kondisi ini hanya menyebabkan pelanggan Mahkamah Syariah mengeluh bahkan mendorong untuk terjadinya ketidakadilan karena penanganan kasus-kasus harus ditunda

²⁶ Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, *Op.cit*, 8 Januari 2013.

²⁷ *Ibid.*

karena bergiliran di antara Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selain dari itu kebanyakan sidang terpaksa dioperasikan di dalam Kamar Hakim.²⁸

Mulai 1 Januari 1988, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu didirikan dan serentak dengan itu Mahkamah Syariah keseluruhan ditempatkan di bawah departemen baru ini dan terus berasing dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.²⁹

Pada awal didirikan JKSTR, administrasi JKSTR termasuk Dewan Bicara (*Court House*) bagi Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, telah ditempatkan di Lantai 1, Wisma Negeri, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu. Sebagai langkah jangka pendek dalam menangani kebutuhan *Court House* dan kebutuhan sebuah departemen, mulai 1 Juli 1994 Pemerintah Negeri setuju agar Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu menyewa di lantai dasar Wisma Seri Amar, Jalan Sultan Ismail, Kuala Terengganu. Dengan menempati bangunan yang disewa itu, sebanyak dua buah *Court House* dan ruang administrasi departemen telah dapat diadakan. Meskipun begitu, kondisi ini masih belum dapat memenuhi permintaan pelanggan Mahkamah Syariah.³⁰

Sebagai langkah jangka panjang, dalam bulan September 1990, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) telah mengajukan proposal agar sebuah

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Government of Terengganu, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, (Terengganu : Kuala Terengganu, 2004), jilid 57, h. 404.

³⁰ *Ibid.*, h. 410.

bangunan khusus dibangun untuk penempatan Mahkamah Syariah di Kuala Terengganu kepada Panitia Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Kantor Daerah dan Tanah Kuala Terengganu dan Kompleks Jabatan Hal Ehwal Agama, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan Perpustakaan Islam Terengganu, di bawah Unit Perancang Ekonomi Negeri. Rekomendasi tersebut telah disepakati, *Project Brief* Bangunan Mahkamah Syariah Kuala Terengganu pada tahap awal disediakan oleh JHEAT.³¹

Pada 4 Desember 1994 Dewan Rapat Negeri di dalam pertemuannya telah membuat pertimbangan pada usulan pembangunan bangunan baru Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. Akhirnya pada 2 Mei 2000, Jabatan Kehakiman Syariah telah beroperasi di bangunannya yang baru yang dinamakan Bangunan Mahkamah Syariah Terengganu, di Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu dan berdekatan Kompleks Pengadilan (Sipil) Kuala Terengganu. Bangunan ini diresmikan oleh Duli Yang Maha Mulia AI-Wathiqu Billah Al-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni AI-Marhum Al-Sultan Mahmud AI-Muktafi Billah Shah.³²

Berdasarkan ketentuan di dalam Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1986, (Enakmen Terengganu Bilangan 12

³¹ *Ibid*, h. 412.

³² Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah adalah merupakan Sultan Terengganu yang ke-16.

Tahun 1986), Mahkamah Syariah di dalam negeri ini dibuat dalam tiga tahap, dan pada saat ini dipecah menjadi posisi seperti berikut : ³³

1. Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu ;
2. Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu (di Daerah Kuala Terengganu sahaja ; ada dua Dewan) ;
3. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut ;
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun ;
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu ;
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman ;
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu (tiga dewan bicara);
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang ; dan
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu.

Setiap pengadilan yang tersebut itu dijadikan salah satu kegiatan atau bagian dalam Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (JKSTR), disamping aktivitas Jasa Manajemen, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta Unit *Sulh*. Oleh yang demikian JKSTR dipecah menjadi kegiatan atau bagian seperti berikut : ³⁴

1. Bagian Layanan Manajemen dan Sumber Daya Manusia ;
2. Mahkamah Rayuan Syariah ;

³³ Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, (Terengganu : Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004), h. 4.

³⁴ *Ibid*, h. 5.

3. Mahkamah Tinggi Syariah ;
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut ;
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun ;
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu ;
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman ;
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu ;
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang ;
10. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu ; dan
11. Unit *Sulh*.

Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986 itu kemudiannya digantikan dengan Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, berlaku mulai 1 Agustus 2002.

Sejak berdirinya melalui Kebenaran Personalial Bilangan 2 Tahun 1988, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu telah beberapa kali diberi Kebenaran-kebenaran Personalial dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan personalia. Dan terakhir penelitian personalia dilaksanakan adalah dalam tahun 2005 yaitu studi personalia untuk mewujudkan Unit *Sulh* (). Lanjutan dari penelitian personalia berkenaan itu, Kebenaran Personalial Jumlah 17/2005 berlaku mulai 6 Oktober 2005 telah diberi kepada JKSTR.

Perakuan-perakuan Jawatankuasa Pemandu tersebut kemudiannya dibawa ke dalam Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali Ke-15

pada 4 Oktober 1986 dan disepakati, di antaranya membuahkan natijah-natijah berikut :³⁵

1. Lulusnya Skema Layanan Pegawai Syariah (A19.00, A11.00, A10.00 kemudian dikategorikan dalam kelas L3, L2, L1). Skema Layanan Pegawai Syariah ini berlaku mulai 1 Februari 1985. Skema ini merupakan satu skema layanan baru untuk memenuhi kebutuhan layanan Kehakiman dan Perundangan Islam ke arah meningkatkan posisi dan sistem administrasi Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh negara. Pegawai yang ditunjuk ke dalam layanan Pegawai Syariah yang baru ini bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengadilan dan administrasi yang berkaitan dengan urusan hukum Syar'i yang mana mereka berperan sebagai Hakim-Hakim Mahkamah Syariah, Pejabat Kejaksaaan dan Pendaftar-Pendaftar Mahkamah.

2. Mulai tahun 1988, Mahkamah Syariah mula diasingkan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri-Negeri termasuk di negeri Terengganu. Mulai tahun 1989 juga penjawat jawatan Pegawai Syariah mulai mengisi posisi di Mahkamah-Mahkamah Syariah dan kemudiannya di lembaga lainnya. Di Terengganu, pengadilan diisi dengan Pegawai Syariah mulai pada 1 Nopember 1989.

³⁵ Government of Terengganu, *Op. Cit*, h. 432.

3) Susunlapis Mahkamah Syariah mulai diperbaiki, yaitu dari dua tingkat kepada tiga tingkat, seperti berikut ³⁶:



Berdasarkan kepada Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syara' 1955, Mahkamah Qadi disusun menjadi salah satu aktiviti di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Kepala kepada kegiatan mahkamah ialah Qadi Besar. Mahkamah Qadi pula disusun dalam dua tingkat, seperti berikut ³⁷:



Mahkamah Qadi dipimpin oleh Qadi Daerah yang menjalankan tugas, selain dari menjadi hakim juga bertindak sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Daerah. Qadi Daerah juga ditunjuk dari kalangan mereka yang bertugas di bawah

³⁶ *Ibid*, h. 441.

³⁷ *Ibid*, h. 442.

Departemen Urusan Agama, yang mana kemudian tertakluk di bawah Skema Pegawai Urusan Islam.

Kepala Departemen bagi Jabatan Hal Ehwal Agama adalah Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Bagian Otoritas dan Penuntutan juga merupakan salah satu kegiatan Jabatan Hal Ehwal Agama dan tunduk kepada Kepala Departemen yang sama dengan Mahkamah Qadi iaitu Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Qadi Besar biasanya diangkat dari kalangan Pegawai Kanan yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama, meskipun tidak mahir dalam administrasi peradilan Islam. Mahkamah Apil Syariah biasanya dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari kalangan Pegawai Kanan Pemerintah yang telah pensiun, begitulah juga dengan ahli-ahli Mahkamah Apil. Orang-orang seperti pensiunan dari jawatan Pegawai Daerah lazimnya diangkat menjadi anggota Mahkamah Apil.

Di Terengganu, Undang-undang Administrasi Hukum Syara' 1955 (Undang-undang Bilangan 4 Tahun 1955) telah disetujui untuk maksud menyusun administrasi, organisasi dan hukum untuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Mahkamah Apil Syariah, Mahkamah Qadi Besar dan Mahkamah Qadi. Undang-undang ini berjalan kuatkuasanya sehingga pada 30 Juli 1987. Mulai 1 Agustus 1987, undang-undang tersebut telah digantikan dengan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam 1986 dan Enakmen Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam 1985.

C. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Mahkamah Syariah Negeri Terengganu yang memiliki organisasi tersendiri dan berpisah dari organisasi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) didirikan hasil dari keputusan Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-15 yang bersidang pada 4 Oktober 1986.³⁸ Hasil pertemuan tersebut telahpun dibawa ke pengetahuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan disepakati dilaksanakan di Negeri Terengganu. Nama Mahkamah juga telah berubah dari nama Mahkamah Qadi kepada Mahkamah Syariah. Julukan posisi pejabat yang memimpin satu-satu Mahkamah Syariah juga diubah dari nama Qadi atau Qadi Besar kepada Hakim atau Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Ketua Hakim Syari'e.

Dalam hubungan ini Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Personalialia bagi Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah dengan melihat hasil dalam kertas pertemuan tersebut. Melalui persetujuan personalia Bilangan 1/1988 berdirilah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berlaku mulai 1 Januari 1988.

Di bawah Restrukturisasi Dewan atau Departemen Agama Islam Negeri, fungsi Mahkamah Syariah telah dipisahkan dari Departemen Agama Islam Negeri.

³⁸ Najib Mohd, (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Terengganu, Tanggal 25 Februari 2013.

Mahkamah Syariah adalah sebagai satu badan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, ianya memiliki kekuatan tertentu melalui amandemen hukum yang ada sehingga pengadilan-pengadilan ini dapat mengawasi dan melaksanakan layanan pengadilan menurut hukum Syara' secara adil, efisien dan sistematis.

Berdasarkan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam, (Terengganu) 1986, Mahkamah Syariah didirikan dalam tiga tingkat yaitu :

1. Mahkamah Rayuan Syariah
2. Mahkamah-Mahkamah Tinggi Syariah
3. Mahkamah-Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah.

Mahkamah Rayuan Syariah dipimpin oleh Ketua Hakim Syari'e. Mahkamah Tinggi Syariah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Setiap Mahkamah Rendah Syariah Daerah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Tiga tingkat pengadilan ini diwujudkan melalui sebuah departemen yang bernama Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu di bawah Kepala Bekalan B 027 Negeri Terengganu.³⁹ Petugas Pengawal bagi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu sekarang adalah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Tingkat-tingkat pengadilan itu dijadikan kegiatan dalam jabatan.

³⁹ Najib Mohd, *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2013.

Tiga tingkat Mahkamah Syariah ini atau kegiatan Jabatan Kehakiman Syariah pada umumnya memiliki dua bagian utama yaitu :

1. Bahagian Administrasi
2. Bahagian Mahkamah / Perundangan (Pengadilan / Hukum)

D. Misi, Visi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu

Adapun misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu adalah :

“Melaksanakan pembicaraan, manajemen pengadilan dan layanan dukungan secara professional, efisien dan sistematis berbasis hukum Syara’ dan undang-undang”.

Visi Jabatan Kehakiman Syariah adalah :

*“Menjadi Lembaga Kehakiman Syariah Yang Berwibawa”.*⁴⁰

Adapun objektif Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah :

1. Menyelenggarakan penanganan kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan efisien berbasis undang-undang dan konstitusi sesuai dengan hukum Syara’.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan staf dari aspek hukum dan manajemen.
3. Menyediakan dan meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dalam administrasi.

⁴⁰ Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu*, (Terengganu : Kuala Terengganu, 1992), h. 2.

4. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan insfratraktur yang terbaik dan memadai.⁴¹

Fungsi Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu adalah :⁴²

1. Menerima, mendengar dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil sesuai hukum Syara' dan ketentuan hukum.
2. Menguatkuasa dan melaksanakan sistem peradilan Islam yang teratur dan efisien.
3. Mengurus kasus-kasus banding syariah secara sistematis dan efektif.
4. Mengelola permohonan pembagian warisan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang terlatih dan memadai.
6. Memberikan jasa konsultan, pertemuan dan perdamaian.

Begitu juga dengan tujuan dan peran Jabatan Kehakiman adalah :⁴³

1. Mempertahankan hukum Islam yang diperuntukkan bagi pengadilan ini untuk menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah S.W.T berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Menjalankan pemerintahan agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjamin kesejahteraan orang Islam.
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka agar menjalani kehidupan sesuai syariat Islam.

⁴¹ *Ibid*, h. 6.

⁴² *Ibid*, h. 10.

⁴³ *Ibid*, h. 13.

4. Menyelamatkan umat Islam dari perpecahan dan keruntuhan rumahtangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan saran serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
6. Memberikan bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan yang ingin menikah agar dapat membangun rumahtangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat mengajukan banding dari pihak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah keluarga seperti nikah, perceraian, talak, *fasakh* dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat dan lain-lain hal mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian warisan dan hal-hal terkait seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh pemerintah.
12. Badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan terkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan selalu berdakwah sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengadopsi sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.

E. Perakuan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Kerajaan Persekutuan (Federal) telah membuat perubahan tentang kewenangan jinayah Mahkamah Syariah, dikenal dengan Undang-undang Mahkamah Syariah (Yurisdiksi Jinayah) Pindaan 1984. Perubahan ini telah memberi kekuasaan yang lebih kepada Mahkamah Syariah untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu hukuman penjara sampai tiga tahun atau apa-apa denda hingga RM 5000 atau cambuk enam rotan atau gabungan kedua hukuman tersebut.⁴⁴

Undang-undang ini adalah perubahan kepada Undang-undang Mahkamah Syariah (Yurisdiksi Jinayah) 1965 yang hanya mengalokasikan hukuman apa-apa kesalahan dapat dihukum dengan penjara untuk satu periode tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi RM 1000 atau keduanya.⁴⁵

Pada tahun 1988, Kerajaan Federal telah membuat perubahan terhadap konstitusi tentang kewenangan Mahkamah Syariah terkenal dengan Undang-undang Perlembagaan (Pindaan) 1988 (Akta A 704) Pasal 121, Konstitusi Federal yang menjelaskan bahwa Mahkamah Sipil tidak lagi memiliki kewenangan tentang apa-apa hal yang Mahkamah Syariah memiliki kewenangan. Pindaan Perkara 121 (1A) Konstitusi Federal menyebutkan :

⁴⁴ Rahmat Mansur, *Pengiktirafan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu*, (Terengganu : Cetak Ilmu Sdn. Bhd, 2001), h. 45.

⁴⁵ *Ibid*, h. 46.

“Pengadilan-pengadilan yang disebut di dalam Pasal (1) tidaklah dapat memiliki kewenangan dengan apa-apa perkara dalam kewenangan Mahkamah Syariah”.

Dengan perubahan ini, keberadaan dan kewibawaan Mahkamah Syariah telah diakui oleh Konstitusi Federal dan Mahkamah Syariah memiliki kewenangan yang mutlak untuk memutus dan menyelesaikan kasus-kasus atau apa-apa hal yang berada di bawah kewenangannya. Ini berarti Mahkamah Sipil tidak bisa membicarakan sesuatu kasus yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Syariah, sedangkan sebelum ini Mahkamah Sipil juga memiliki kewenangan yang sama, di dalam beberapa kasus dan Mahkamah Sipil dapat mengadilinya dan jika ada perbedaan maka keputusan Mahkamah Sipil adalah sah.⁴⁶

Pemerintah Federal juga telah melakukan perubahan terhadap Perlembagaan Malaysia untuk memberikan daya tahan kepada hakim Mahkamah Syariah seperti yang diberikan kepada seorang hakim terkenal dengan Undang-undang Konstitusi (Perubahan) 1988, Pasal 5(4) Federasi. Dengan perubahan ini berarti Hakim Mahkamah Syariah telah diberi kuasa seperti seorang hakim Sipil di dalam hal daya tahan diri.

Untuk merealisasikan kekuasaan Mahkamah Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 121 (1A) Konstitusi Federal itu, Kanun Tanah Negara (*National Land Code*) telah diubah dengan memasukkan satu bagian baru yaitu bagian 421A

⁴⁶ *Ibid*, h. 54.

melalui Undang-undang Hukum Tanah Nasional (Perubahan) 1991. Perubahan tersebut telah disetujui dan berlaku mulai 1 Januari 1993. Bagian 421A berbunyi :

“Untuk tujuan bagian 417 dan 420 "Mahkamah" termasuk Mahkamah Syariah”.

Pemerintah juga telah membentuk Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syara’ dan Sipil, di bawah Bagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, untuk meningkatkan pelaksanaan hukum Islam, memperluas kewenangan Mahkamah Syariah dan mengkoordinasikan hukum Sipil agar sesuai dengan hukum Syara’.⁴⁷

F. Pelaksanaan Pengadilan di Mahkamah Syariah

Cara pelaksanaan di Mahkamah Syariah memiliki tiga cara, di antaranya adalah Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Pada hari ini ada tujuh Mahkamah Rendah Syariah di Terengganu, iaitu berdasarkan daerah-daerah yang ada. Setiap Mahkamah tersebut memiliki fungsi yang sama cuma mengikut daerah masing-masing dan adalah seperti berikut :⁴⁸

1. Menerima kasus yang dibawa ke pengadilan ini apakah kasus-kasus *mal*, jinayah dan *faraid* dan mengelolanya.

⁴⁷ *Ibid*, h. 59.

⁴⁸ *Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terengganu 2001*, (Terengganu : Percetakan Nasional Berhad Cawangan Terengganu, 2001), h. 8.

2. Mendengar dan menyelesaikan kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan ini dengan adil berdasarkan ketentuan yang diberikan dalam hukum Syara' dan undang-undang.
3. Penanganan Mahkamah Rendah Syariah di daerah-daerah.
4. Menerima gugatan / permohonan / pernyataan dari setiap orang.
5. Mendaftar dan mengkategorikan kasus.
6. Mengadili kasus.
7. Memutuskan hukuman dan perintah.
8. Melaksanakan hukuman dan setiap perintah yang terkait.

Selain daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga mempunyai cara pelaksanaannya tersendiri, antaranya adalah :⁴⁹

1. Mengelola administrasi pelayanan dan pengembangan Mahkamah Rayuan Syariah dan Jabatan Kehakiman Syariah keseluruhan.
2. Menerima kasus yang dibawa ke pengadilan ini apakah kasus-kasus *mal* maupun jinayah dan *faraid*, dan mengelolaknya.
3. Mendengar dan menyelesaikan kasus-kasus mulai bicara yang dibawa ke pengadilan ini dengan adil berdasarkan ketentuan yang diberikan dalam hukum Syara' dan undang-undang.
4. Melakukan pemeriksaan atas catatan persidangan kasus-kasus jinayah Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah.

⁴⁹ *Ibid*, h. 11.

5. Mendengar, meneliti, memperbaiki dan memutuskan kasus-kasus banding dari Mahkamah Rendah Syariah Daerah-daerah.
6. Menyediakan jurnal pengadilan untuk diterbitkan (untuk beberapa negeri).

Yang ketiga adalah Mahkamah Rayuan Syariah dengan pelaksanaannya adalah :

1. Mengurus, mendengar, meneliti, memperbaiki dan memutuskan kasus-kasus banding yang dibawa dari Mahkamah Tinggi Syariah, sesuai ketentuan hukum Syara' dan undang-undang.
2. Melakukan revisi atas catatan persidangan kasus-kasus jinayah Mahkamah Tinggi Syariah baik dalam kewenangan asalnya maupun dalam kewenangan rayuannya.
3. Melakukan revisi catatan setiap proses dalam hal jinayah di Mahkamah Tinggi Syariah untuk maksud meyakinkannya bahwa keputusan proses itu adalah benar dan sah, dan membawa proses itu dilakukan sesuai aturan pengadilan.
4. Menciptakan sistem Kehakiman Syariah secara teratur, profesional dan efisien.
5. Memiliki daya pembatalan mana-mana keyakinan hukuman oleh Mahkamah Syariah.
6. Mengurangi hukuman.
7. Memerintah agar diadakan pembicaraan ulang atau ulang bicara.

8. Menerima banding terdakwa yang dihukum penjara atau denda tidak kurang RM 25.00 dan telah mengajukan banding sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
9. Setiap banding akan didengar setidaknya oleh tiga orang panel (hakim) banding dari Panel (hakim) Rayuan Syariah yang dilantik dan ditauliah oleh KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Ketua Panel Rayuan Syariah). Keputusan pengadilan adalah muktamad dan sah.⁵⁰

Awal berlaku suatu enakmen untuk mengubah dan menyatukan ketentuan Undang-undang Keluarga Islam tentang perkawinan, penceraian, nafkah, penjaga dan hal-hal lain berkaitan dengan kehidupan keluarga. Enakmen ini bolehlah disebut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 1985. Berlakunya enakmen ini mulai pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam warta. Ia berlaku bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam negeri Terengganu Darul Iman dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam negeri Terengganu Darul Iman tetapi tinggal di luar negeri itu.

Prestasi Mahkamah Syariah menurut Zahid Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sebanyak 90 persen kasus-kasus melibatkan Mahkamah Syariah berhasil diselesaikan dalam waktu 12 bulan, sekaligus melenyapkan tuduhan

⁵⁰ *Ibid*, h. 14.

pihak tertentu terhadap lembaga itu yang dikatakan lewat menyelidiki kasus dan sering tertunda.⁵¹

G. Kompetensi Absolute Mahkamah Syariah

Istilah *mal* sebenarnya merujuk kepada harta tetapi dalam konteks perundangan di Malaysia, ia merujuk kepada kasus-kasus bukan jinayah. Yurisdiksi *mal* bagi Mahkamah Syariah berlaku bagi semua orang Islam yang tinggal (bermastautin) di negeri-negeri di Malaysia. Dan sebenarnya, Mahkamah Syariah mempunyai yurisdiksi *mal* yang hampir lengkap dan merangkum banyak aspek kekeluargaan Islam termasuklah urusan-urusan sebagai berikut :

1. Terkait dengan isu-isu sebelum perkawinan ;⁵²
2. Terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul semasa perkawinan ;⁵³
3. Terkait persoalan pembubaran perkawinan ;⁵⁴
4. Masalah yang timbul atau berbangkit setelah perceraian ;⁵⁵
5. Permohonan penegakan perintah mahkamah ;⁵⁶

⁵¹ Koran Utusan Malaysia, Tanggal 14 Januari 2012.

⁵² Seperti putus tunang, permohonan kebenaran untuk berkawin dan permohonan berpoligami.

⁵³ Seperti permohonan mengesahkan perkawinan, permohonan membatalkan perkawinan yang tidak sah, permohonan nafkah diri, nafkah anak, mensabitkan istri nusyuz, permohonan istri supaya suami hidup bersama semula dan sebagainya.

⁵⁴ Permohonan cerai *khulu'*, *li'an*, *fasakh*, talak, ta'liq, perceraian dengan perintah, karena murtad dan juga secara anggapan mati.

⁵⁵ Perkara-perkara ini boleh dirujuk di mahkamah yang ada bidang kuasanya, yaitu selepas perceraian berlaku. Umpamanya, sugu hati (*muta'ah*) selepas perceraian, harta sepencarian, nafkah iddah, nafkah anak, nafkah tertunggak dan juga soal *hadhanah* (penjagaan anak).

⁵⁶ Ini berlaku apabila keputusan yang dikeluarkan tidak diikuti oleh pihak yang kena tanggungan. Maka, pihak yang satu lagi boleh menuntut supaya perintah-perintah yang dikeluarkan itu dikuatkuasakan oleh pihak mahkamah.

6. Setiap permohonan di dalam kasus sedang berjalan (*interlocutory order*);⁵⁷
7. Permohonan mengenai wasiat, wakaf dan warisan.

Mahkamah Tinggi Syariah pula berkompetensi dalam kewenangan *malnya* untuk mendengar dan memutuskan perkara yang melibatkan jumlah atau nilai yang melebihi RM 100,000 termasuk kasus *hadhanah*, poligami dan harta sepencarian.

Ada dua jenis kategori pendaftaran kasus *mal* yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah di Malaysia umumnya, yaitu :

1. Kasus Tuntutan / Kasus gugatan

Kasus tuntutan adalah setiap tindakan atau *prosiding* kasus *mal* yang dimulai dengan gugatan beserta pernyataan tuntutan. Setiap pernyataan tuntutan dapat dikenakan biaya (*fee*)⁵⁸ sejumlah RM 50.⁵⁹

⁵⁷ Contohnya, permohonan sementara nafkah sama ada diri dan anak, *hadhanah*, permohonan larangan (injunksi) dari seorang wanita terhadap bekas suaminya untuk tidak mengganggunya atau perintah larangan agar harta yang dimiliki secara bersama tidak dibenarkan untuk dilibatkan dalam sebarang urusan selama tempoh perbicaraan berlangsung. Bagi perkara seumpama ini, bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi satu-satu kes perbicaraan mengambil masa yang lama, karena banyak perkara atau isu yang timbul dan perlu diselesaikan oleh mahkamah. Sekiranya tidak diselesaikan, akan menyebabkan ketidakadilan dan aniaya kepada para pihak yang terlibat. Jadi, undang-undang memberikan ruang supaya para pihak dibenarkan untuk membuat permohonan sementara, ketika proses perbicaraan berlangsung.

⁵⁸ "Fee" adalah bayaran pemfailan suatu saman/permohonan di mahkamah sebagaimana yang telah ditetapkan dan dikehendaki membayarnya pada waktu saman/permohonan difailkan. Di Indonesia, "fee" dikenal sebagai biaya perkara.

⁵⁹ RM 50 bersamaan dengan Rp 150,000. (Pertukaran bulan Februari 2013 – Rp 3000 bersamaan RM 1).

2. Kasus Permohonan

Kasus permohonan adalah setiap tindakan atau prosiding kasus *mal* yang dimulai dengan notis permohonan beserta *affidavit*⁶⁰ dukungan. Notis permohonan hendaklah memuat fakta yang cukup rinci untuk menjayakan suatu permohonan dan harus didukung dengan *affidavit* yang diikrarkan (sumpah di hadapan Hakim Syari'e atau Pendaftar). Setiap pendaftaran permohonan dikenakan bayaran sejumlah RM 2 dan tambahan RM 1 bagi *ekshibit*.⁶¹ Di sini, kasus konfirmasi atau perintah nikah dan kasus permohonan wali hakim atau wali am termasuk dalam kategori kasus berbentuk permohonan. Dalam kaitan permasalahan yang dikaji, kasus permohonan pengesahan taraf atau nasab anak termasuk dalam kategori kasus berbentuk permohonan.

H. Piagam Pelanggan Mahkamah Syariah

Dasar layanan departemen ini adalah memberi keadilan kepada pelanggan yang berteraskan kepada hukum Syara' dan undang-undang. Departemen membuat usaha sebagaimana berikut :

1. Mengatur tanggal sebutan / bicara / *sulh* kepada pelanggan pada hari pendaftaran kasus ;

⁶⁰ *Affidavit* adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai suatu fakta dan hendaklah dibuat dengan sumpah di hadapan Hakim Syari'e atau Pendaftar Mahkamah Syariah.

⁶¹ *Ekshibit* adalah dokumen dan sebagainya yang diserahkan bersama permohonan ke pengadilan bagi menjelaskan suatu fakta yang ditimbulkan atau menyokong keterangan para pihak dalam proses berperkara. RM 2 bersamaan dengan Rp 6000 dan setiap *ekshibit* dikenakan bayaran tambahan kira-kira Rp 3000 yang senilai dengan RM 1.

2. Menyebut / membicarakan sesuatu kasus *mal* dan jinayah dalam waktu 21 hari setelah didaftarkan ;
3. Mengeluarkan Sertifikat Faraid dalam waktu 21 hari setelah dilakukan pembagian hak waris ;
4. Menyebut / membicarakan setidaknya 80 persen dari kasus *mal* dan kasus jinayah yang telah didaftarkan dalam setahun ;
5. Keputusan tertulis akan dikeluarkan dalam waktu 14 hari dari tanggal keputusan dibuat untuk kasus *mal* dan kasus jinayah dalam waktu 30 hari ;
6. Penghakiman akan dibuat dalam waktu 30 hari setelah penggulangan hujah ;
7. Menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat terhadap setiap keluhan pelanggan dalam waktu 14 hari dari tanggal pengaduan diterima ;
8. Mendengar rayuan kali pertama dalam waktu 30 hari setelah catatan banding diterima dari pengadilan yang keputusannya dirayu.⁶²

⁶² *Papan Tanda*, Lantai Dasar, Mahkamah Syariah Terengganu, Terengganu.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB ANAK

A. Pengertian Nasab

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan taraf anak atau nasab anak, terlebih dahulu penulis kemukakan arti nasab anak. Untuk mempermudah pembahasan tentang pengertian nasab anak, maka penulis mencoba mengungkapkan dan menyajikan dari dua segi yaitu dari segi bahasa dan istilah.

1. Nasab dari segi bahasa

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang nasab anak, terlebih dahulu penulis kemukakan arti nasab ditinjau dari segi bahasa. Nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *نسب* – ينسب –, apabila ada kalimat berarti *نسبه وصفه* memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya.⁶³ Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisab*, seperti kata menjadi *نسب*.⁶⁴ Selain itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansab* sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-Mukminun (23) ayat 101 :



⁶³ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut : Dar Al-Masyriq, 1977), Cet. ke-2, h. 803.

⁶⁴ Yasin bin Nasir bin Mahmud Al-Khatib, *Tsubut An-Nasab*, (Jeddah : Dar Al- Bayan Al-Arabi, 1987), Cet. Pertama, h. 9.

Artinya :

“Kemudian, ketika ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat hubungan kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat mereka saling bertanya”.

Selain ayat di atas, kata nasab dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam Al-Qur'an, pertama dalam QS. Ash-Shaffat (37) ayat 158 Allah berfirman :



Artinya :

“(Mereka telah mengatakan hal yang mustahil) serta mengadakan hubungan kerabat di antara Allah dan malaikat, padahal demi sesungguhnya malaikat itu sedia mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang yang melakukan demikian akan diseret (ke dalam azab pada hari Akhirat)”.

Ayat di atas membicarakan sifat-sifat kaum musyrikin Mekah yang di antara anggapan mereka adalah bahwa jin memiliki nasab dengan Allah.

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam QS. Al-Furqan (25) ayat 54 sebagai berikut :



Artinya :

“Dan Dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya (memiliki) titisan keturunan dan penalian keluarga

(persemendaan); dan memang Tuhanmu berkuasa (menciptakan apapun yang dikehendaki-Nya)".

Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *الصهر* dan *الصهر* keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia.⁶⁵ Dalam hal ini secara lebih jelas Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan sel telur (ovum) seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekadar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat *tahrim*⁶⁶, maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah dan tidak berakibat adanya kewajiban *'iddah*, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah, melainkan dalam kasus anak hasil zina, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahir anaknya.

Kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau *Al-Qarobah* (kerabat). Kerabat dinamakan nasab karena antara dua kata tersebut ada hubungan dan keterkaitan. Berasal dari frasa "*nisbatuhu ilaa abiihi nasaban*" (nasabnya kepada ayahnya), Ibnu Sikit berkata, "Nasab itu dari sisi ayah dan juga ibu". Sementara sebahagian ahli bahasa mengatakan, "Nasab itu khusus pada ayah", artinya seseorang dinasabkan kepada ayahnya saja dan tidak dinasabkan kepada ibu kecuali dalam keadaan luar biasa.

⁶⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), jilid 13, h. 59.

⁶⁶ *Ibid.*

Su'di Abu Habib mengatakan bahwa arti kata nasab sama dengan kerabat.⁶⁷ Namun demikian baik kata keturunan, kerabat, maupun nasab sendiri pada kenyataannya telah menjadi bahasa Indonesia resmi dan telah diakui. Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁶⁸ Dalam *Ensiklopedia Islam*, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.⁶⁹ *Ensiklopedia Hukum Islam* pula mendefinisikan nasab sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁷⁰

2. Nasab dari segi istilah

Nasab secara terminologi tidak dapat dipisahkan dengan pengertian secara etimologi yaitu keturunan atau kerabat. Dalam *Ensiklopedia Islam*, nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi dan lain-lain).

Menurut Yasin bin Nasir, nasab secara Syara' adalah sebagai berikut :

⁶⁷ Su'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Ishtilaahan*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), Cet. ke-2, h. 351.

⁶⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet. Pertama, h. 609.

⁶⁹ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1990) Cet. Pertama, jilid 4, h. 13.

⁷⁰ *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1997) Cet. Pertama, jilid 4, h. 1304.

حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر من حيث أن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو مشتبهين الثابت للذى يكون الحبلى من مائه

Artinya :

*“Kondisi hukum yang disandarkan antara seseorang dengan orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami istri maupun ikatan kepemilikan yang sah di mana, baik ikatan suami istri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan yang diakui kebenarannya. Ketetapan ini dihubungkan kepada seseorang yang melalui air spermanya kehamilan itu terjadi”.*⁷¹

Pada dasarnya definisi nasab secara Syara’ seperti di atas sudah bersifat *jami’* dan *mani’*, artinya sudah dapat mencakup dan mewakili semua aspek yang ada di dalamnya. Namun ditinjau dari redaksi yang dikemukakan agak sulit dimengerti, oleh karena itu, penulis lebih cenderung terhadap definisi nasab yang diuraikan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dengan menambahkan sedikit penjelasan, yaitu bukan hanya dibentuk melalui pernikahan yang sah saja, melainkan juga melalui perkawinan yang *fasid* dan hubungan badan secara syubhat.

Di sini penulis dapat simpulkan bahwa nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid* dan hubungan badan yang syubhat.

⁷¹ Yasin bin Nasir, *Op. Cit*, h. 10.

B. Dasar Hukum

Setelah membahas masalah nasab dari segi pengertian, maka di bawah ini penulis membahaskan dasar-dasar hukum nasab yang mengacu pada memperjelas tentang nasab itu sendiri.

Nasab merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam dan harus dijaga kemurniannya dengan tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan seperti zina. Sebab di samping sebagai nikmat dan karunia besar bagi hamba Allah, nasab juga merupakan hak yang paling pertama yang harus diterima oleh seorang sebelum hak-hak yang lain diperoleh dari kedua orangtua.

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Islam sangat menekankan agar setiap individu menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Oleh karena itu, hukum Islam sangat mengecam dan melarang keras perzinaan, sehingga anak yang lahir akibat perzinaan sama sekali tidak bisa memperoleh hak nasab kepada ayah kandungnya. Anak zina secara yuridis

selamanya tidak akan pernah mempunyai ayah kandung yang sah. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama' mazhab fiqh mana pun.

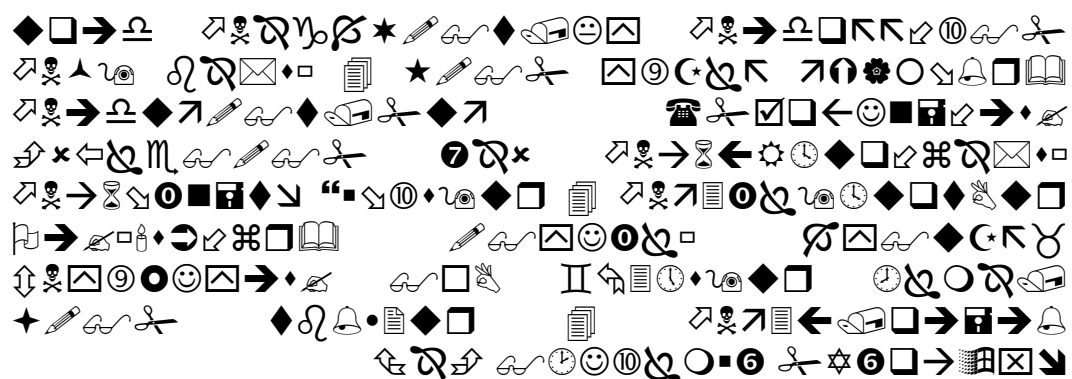
Dengan demikian, nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya, sesuai dengan firman Allah di dalam QS. Al-Furqan (25) ayat 54 :



Artinya :

“Dan Dia lah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijakannya (memiliki) titisan baka dan penalian keluarga (persemendaan); dan memang Tuhanmu berkuasa (menciptakan apapun yang dikehendaki-Nya)”.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengacu kepada nasab anak dan menjadi sumber hukum yang utama tentang nasab adalah berdasarkan firman-Nya di dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 5 yang berbunyi :



Artinya :

“Panggillah anak-anak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada ayah mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui ayah mereka, maka panggillah mereka

sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai "maula-maula" kamu. Dan kamu pula tidak dihitung berdosa dalam hal yang kamu keliru melakukannya, tetapi (yang dihitung berdosa itu adalah perbuatan) yang disengaja oleh hati kamu melakukannya. Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang".

Dalam kaitan ini, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram pula bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَأْنَةَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يَدْخُلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْهُ وَفَضَّحَهُ عَلَى رِءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :

"Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya, sekali-kali Allah tidak memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir di hari kiamat". (HR. An-Nasa'i)⁷²

Selain itu seorang anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayah kandungnya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

⁷² An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1982), jilid 6, h. 224.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya :

“Dari Abu Bakrah berkata, kedua telinga mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW, bersabda : “Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada pria selain ayahnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR Ibnu Majah)⁷³

Dari beberapa ketentuan ini, baik yang terdapat dalam QS. Al-Furqan (25) ayat 54, QS. Al-Ahzab (33) ayat 5 maupun dalam dua hadits di atas, dapat diketahui bahwa nasab merupakan karunia dan nikmat besar yang harus dijaga kemurniannya. Karena nasab yang terpelihara dengan baik, akan sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga, keluarga dan masyarakat.

C. Pendapat Ulama’ Mengenai Status Anak Zina

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dengan perbuatan zina, sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apa pun dari pasangan yang berzina itu.⁷⁴

Namun demikian, karena anak itu lahir akibat perbuatan nista, tercela dari segi moral maupun agama, maka masyarakat umum menyebut anak tersebut

⁷³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1985) h. 335.

⁷⁴ Ahmad Asy-Syarbasi, *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*, (Beirut : Dar Al-Jayl, 1977), Cet. Pertama, jilid 5, h. 118.

sebagai anak zina atau anak haram. Meskipun ia dilahirkan suci, tetapi ia memiliki posisi lain dibanding dengan anak biasa yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Para ulama' sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat,⁷⁵ melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan, selain itu alasan kuatnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits :

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

Artinya :

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim)⁷⁶

Hadits tersebut telah disepakati oleh para ulama' dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah terlihat dalam beberapa aspek yuridis, di mana pria yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib

⁷⁵ *Ibid*, jilid 4, h. 103.

⁷⁶ Hadis Shahih, *Al-Bukhari* (6818) dan *Muslim* (1458).

memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, pria tersebut tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan dalam syariat Islam.⁷⁷

Ibnu Hazim menegaskan, anak yang lahir akibat perzinahan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibu kandungnya saja.⁷⁸

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* juga menyebut, sebagai berikut :

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Artinya :

*Para ulama' bersepakat (ijma') pada anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.*⁷⁹

Jadi, zina tidak mengakibatkan adanya nasab bagi pria yang menzinai wanita tersebut, akan tetapi hanya dapat dihubungkan dengan ibu kandungnya saja, bukan ayah biologisnya.

⁷⁷ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), Cet. Pertama, jilid 5, h. 116.

⁷⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tth), jilid 9, h. 309.

⁷⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), jilid 9, h. 123.

D. Penetapan Adanya Nasab

Pembahasan masalah nasab khususnya yang terkait dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara mengaturnya, tidak bisa lepas dari masalah masa kehamilan, baik yang berkaitan dengan batas minimal waktu kehamilan maupun batas maksimal waktu kehamilan. Untuk menentukan ketetapan nasab seorang bayi, harus diketahui kapan kedua orangtuanya melaksanakan akad nikah, pada tanggal berapa hubungan badan dalam pernikahan pertama kali terjadi setelah kondisi rahim bersih.⁸⁰

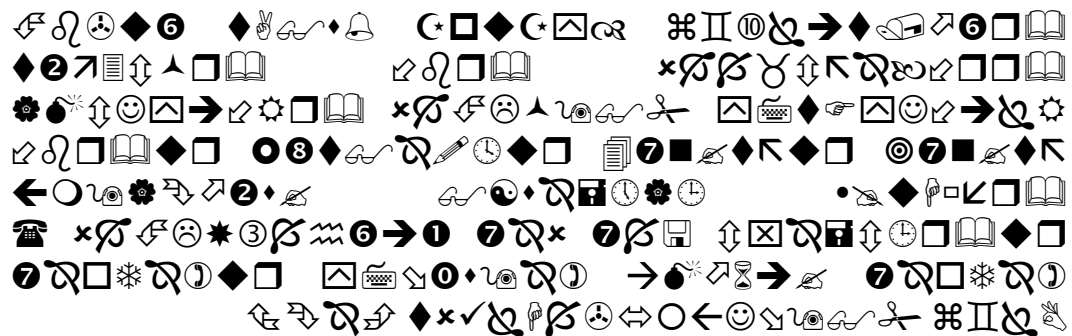
1. Batas Minimal Masa Kehamilan

Dalam hal batas masa kehamilan, para fuqaha' dari mazhab mana pun telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam QS. Al-Ahqaaf (46) ayat 15 dan QS. Luqman (31) ayat 14. Dari kombinasi pemahaman kedua ayat ini dapat diketahui bahwa batas minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Dalam QS. Al-Ahqaaf (46) ayat 15 Allah berfirman⁸¹ :



⁸⁰ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012), h. 33.

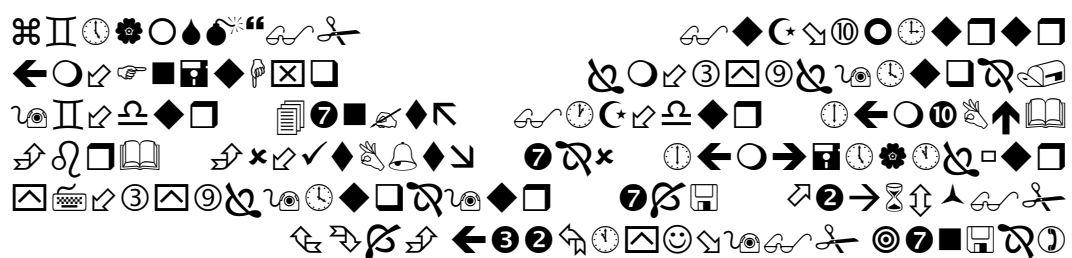
⁸¹ *Ibid*, h. 34.



Artinya :

“Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang masa mengandungnya beserta dengan periode menceraikan susunya adalah dalam waktu tiga puluh bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke usia empat puluh tahun, berdoa ia dengan berkata: "Wahai Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap bersyukur akan nikmat-Mu Yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku,, dan agar aku tetap mengerjakan amal shaleh yang Engkau redai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepada-Mu)”.

Adapun dalam QS. Luqman (31) ayat 14 Allah berfirman :



Artinya :

“Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal kehamilan sampai akhir menyusunnya), dan periode menceraikan susunya adalah dalam waktu dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu;

dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan)”.

Ali bin Abi Talib menjadikan ayat 15 surah Al-Ahqaaf dan ayat 14 surah Luqman sebagai dalil bahwa masa minimal mengandungkan anak adalah enam bulan.⁸² Hal ini merupakan kesimpulan kuat lagi shahih yang disetujui oleh ‘Utsman dan sekelompok sahabat.

Terkait dengan masalah ini, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa di zaman khalifah ‘Utsman bin Affan ada seorang pria yang menikah dengan seorang wanita, dalam masa enam bulan sejak melaksanakan akad nikah, wanita itu melahirkan anak. Maka permasalahan ini dilaporkan kepada khalifah ‘Utsman, sehingga beliau pun berniat menjatuhkan hukuman rajam. Pada saat itu Ibnu Abbas berkata : “Seandainya aku diminta menyelesaikan masalah kalian atas dasar Al-Qur’an niscaya permasalahan kalian akan terselesaikan, betapa Allah telah berfirman ‘mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan’ sehingga waktu yang dibutuhkan untuk hamil cukup dengan enam bulan”. Maka ‘Utsman mengambil pendapat Ibnu Abbas di atas sebagai dasar penyelesaian kasus tersebut dan hukuman *hadd* pun dicabut.⁸³

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu membutuhkan waktu tiga puluh bulan mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau 24 bulan, sehingga 30 dikurangi

⁸² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), jilid 8, h. 399.

⁸³ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tth), jilid 7, h. 442.

24 sama dengan enam, artinya enam bulan. Enam bulan tersebut ialah batas masa kehamilan menurut hukum Syara'.

Di dalam kelahiran, tidak mustahil terjadi kelahiran prematur. Dalam hal anak yang lahir prematur (tidak cukup bulan), nasab anak tetap dihitung saat akad nikah orang tuanya sampai ia dilahirkan. Namun jika tempoh akad nikah sampai melahirkan kurang enam bulan, ia tidak dipermasalahkan jika pasangan suami istri tidak melakukan zina sebelum bernikah. Menurut ilmu kesehatan, jika kemungkinan akan terjadi kelahiran premature, biasanya diberikan obat *tokolitik* untuk menghentikan kontraksi dan *kortikosteroid* untuk mempercepat pematangan paru-paru bayi. Salah satu langkah terpenting dalam mencegah prematuritas adalah mulai melakukan pemeriksaan kehamilan sedini mungkin dan terus melakukan pemeriksaan selama kehamilan.⁸⁴

2. Batas Maksimal Masa Kehamilan

Berbeda dengan masalah batas minimal waktu kehamilan yang memang terdapat dalil nash Al-Qur'an secara tegas, sehingga dapat disepakati oleh para ulama', terkait dengan batas maksimal waktu kehamilan ini penuh dengan kontradiksi persepsi dan perbedaan pemahaman di kalangan para ahli hukum Islam.⁸⁵ Ini tidak dapat dihindarkan, karena di samping tidak terdapat dalil *naqli* yang disepakati, para ulama' dalam memberikan argumentasinya didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sifatnya temporer dan kasuistik bahkan antara

⁸⁴ "Prematuritas, Buku Saku Dokter", diakses pada 12 Juni 2103 dari <http://www.medicastore.com>.

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Semarang : Toha Putera, tth), jilid 2, h. 268.

kasus satu dengan kasus yang lain tidak jarang saling bertentangan.⁸⁶ Dalam hal ini, setidaknya ada tujuh pendapat yang satu dengan yang lainnya bertahan dengan argumentasinya masing-masing, yaitu sebagai berikut :⁸⁷

1. Menurut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri yang disandarkan kepada pendapat Umar bin Al-Khattab bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah sembilan bulan Qamariyah.⁸⁸
2. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah.
3. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa batas maksimalnya adalah dua tahun. Hal ini didasarkan atas ucapan Aisyah istri Nabi SAW yang mengatakan bahwa seorang bayi tidak mungkin akan berada dalam rahim atau kandungan ibunya lebih dari dua tahun, sebagaimana informasi yang diriwayatkan Ad-Daruquthni⁸⁹ :

عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت لا تزيد المرأة في حملها على ستين قد
رظّل المغزل

Artinya :

“Dari Aisyah R.A sesungguhnya ia mengatakan seorang wanita tidak akan pernah hamil lebih dari dua tahun, (sekalipun kelebihannya)

⁸⁶ Badran Abu Al-Ainain Badran, *Huquq Al-Aulad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun*, (Iskandariah : Muassasah Syabab Al-Jamiah, tth), h. 8.

⁸⁷ Mushtafa As-Siba'i, *Syarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (Damaskus : Matba'ah Jami'ah, 1972), Cet. ke-5, jilid 1, h. 280.

⁸⁸ Ibnu Hazm, *Op. Cit*, jilid 10, h. 216.

⁸⁹ Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruqhutni*, (Kaherah : Dar Al-Mahasin li At-Tiba'ah, 1996), jilid 3, h. 322.

hanya sebatas bayangan alat pemintalnya". (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni)

Berdasarkan hadits di atas Abu Hanifah dan para sahabatnya berkeyakinan bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun, kalau saja hadits tersebut disepakati kehujjahannya tentunya perbedaan pendapat dalam masalah batas maksimal masa kehamilan sama dengan batas minimal masa kehamilan dalam hak kesepakatannya.

4. Menurut pendapat Al-Laits seorang ahli fiqh Mesir pada abad kedua Hijriah bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah tiga tahun.
5. Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun. Dalam hal ini sebagian ahli fiqh golongan Hanafiah bahkan mengatakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad juga berpendapat demikian.⁹⁰
6. Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama' golongan Maliki, Al-Laits, Ibnu Sa'ad dan Abad bin Al-Awwam bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah lima tahun.
7. Menurut pendapat sebagian ulama' mazhab Maliki bahwa batas masa kehamilan adalah tujuh tahun.⁹¹

Dari berbagai pendapat para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa masalah batas maksimal masa kehamilan ini tidak satu pun didasarkan atas

⁹⁰ Ibnu Abidin, *Raddi Al-Muhtar 'Ala Durri Al-Muhtar*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1992), jilid 2, h. 623.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, Diterjemah Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 10, h. 29.

dalil, baik dalil Al-Qur'an maupun hadits. Argumentasi yang dimunculkan oleh mereka bersifat temporer dan kasuistik, sehingga tidak ada standar pasti yang dapat dipegang sebagai pendapat yang paling benar.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa permasalahan tentang batas maksimal masa kehamilan ini perlu dikembalikan kepada adat kebiasaan yang terjadi dan eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Pendapat Abdullah bin Abdul Hakam dan Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dinilai sebagai pendapat yang sesuai dengan kasus sebenarnya bukan kasus yang sifatnya ganjil dan penetapan hukum hanya dapat disandarkan atas kasus nyata, bukan yang jarang terjadi.⁹²

Dengan demikian penulis lebih cenderung pada pendapat Ibnu Rusyd. Sebab untuk menentukan hukum harus didasarkan pada kasus yang pada umumnya terjadi. Wanita hamil biasa berkisar antara delapan, sembilan, sampai sepuluh bulan. Bahkan dalam hal ini di Mesir sebelum keluar UU No. 25 Tahun 1929, penentuan masalah batas maksimal masa kehamilan ini berdasarkan atas pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, namun setelah berlakunya undang-undang tersebut batas maksimal masa kehamilan diubah menjadi satu tahun.⁹³

Demikian halnya yang terjadi di Syiria, Tunisia, dan Moroko. Bahkan di Syiria ditentukan secara jelas bahwa batas minimal masa kehamilan adalah 180 hari dan batas maksimalnya adalah satu tahun Syamsiyyah.⁹⁴ Jadi, kesimpulannya bahwa batas minimal masa kehamilan telah disepakati enam bulan sama dengan

⁹² Ibnu Rusyd, *Loc. Cit.*, h. 268.

⁹³ Ala'uddin Khurafah, *Syarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (Baghdad : Matba'ah Al-Ma'arif, 1963) jilid 2, h. 169.

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986), Cet. Pertama, jilid 7, h. 678.

180 hari dan batas maksimalnya, meskipun melalui perdebatan panjang, tetapi sebagaimana direkomendasikan oleh para dokter ahli yang beragama Islam bahwa batas maksimalnya selama satu tahun Syamsiyyah sama dengan 365 hari, tetapi pada umumnya berkisar antara delapan, sembilan, sampai sepuluh bulan.

E. Keharusan (Kewajiban) Memelihara Nasab

1. Pemeliharaan Nasab Satu Tujuan Hukum Islam

Nasab merupakan nikmat dan karunia besar yang dijadikan Allah SWT bagi hamba-Nya, bahkan sebagai hak penting yang harus diterima oleh seorang bayi dari kedua orangtuanya. Nasab tidak akan muncul begitu saja tanpa melalui proses dan alasan yang dapat dibenarkan secara agama dan tidak cukup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes darah dan tes DNA antara bapak dan anak biologisnya.

Di dalam Islam ada disebut dengan *al-Kuliyyah al-Khams* atau pancajiwa syariat yang harus dijaga dengan baik.⁹⁵ Oleh karena agama harus dijaga, maka akidah harus bersih dari unsur syirik dan kelima pilar agama dalam rukun Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menjaga agama ini disyariatkanlah jihad, yaitu berperang di jalan Allah untuk membela agama dari serangan musuh.⁹⁶

Selain itu, syariat agama Islam diberlakukan adalah untuk menjaga jiwa manusia, menjaga akal, menjaga harta dan yang terakhir adalah menjaga nasab

⁹⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (tt : Dar Al-'Ilm, 1987), Cet. ke-12, h. 200.

⁹⁶ *Ibid*, h. 201.

atau keturunan. Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan serta sangat menganjurkan pernikahan untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Pelaku zina baik *muhsan*⁹⁷, maupun *ghairu muhsan*⁹⁸ harus dikenai hukum rajam atau dera seratus kali.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkan ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Ulama' fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁹⁹

2. Larangan Adopsi Secara Mutlak

Dalam menjaga kemurnian nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga melarang konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapus nasab anak dengan ayah kandungnya. Hal ini disebut dalam *asbab an-nuzul* surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan kasus adopsi Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah yang oleh masyarakat ketika itu disebut sebagai Zaid putra Muhammad, bukan putra Haritsah, sehingga turun ayat QS Al-Ahzab (33) : 4-5 :

⁹⁷ *Muhsan* adalah orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah kawin, baik masih terikat perkawinan maupun telah bercerai.

⁹⁸ *Ghairu muhsan* adalah kebalikan dari *muhsan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh para pihak yang masing-masing belum dan tidak sedang dalam keadaan nikah, melainkan para pelaku gadis dan pria.

⁹⁹ Nurul Irfan, *Op. Cit*, h. 8.



Artinya :

(Diperintahkan dengan yang demikian karena) Allah tidak sekali-kali membuat seseorang memiliki dua hati dalam rongga dadanya; dan ia tidak menjadikan istri-istri yang kamu "zihar" kan itu sebagai ibumu; dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu anggap mengenai hal-hal) yang tersebut itu hanyalah kata kamu dengan mulut kamu saja. Dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Panggillah anak-anak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada bapa-bapa mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui ayah mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seugama dan sebagai "maula-maula" kamu. Dan kamu pula tidak dihitung berdosa dalam hal yang kamu keliru melakukannya, tetapi (yang dihitung berdosa itu ialah perbuatan) yang disengaja oleh hati kamu melakukannya. Dan (ingatlah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Meskipun ajaran Islam sangat menganjurkan untuk selalu menjaga kemurnian nasab dan melarang adopsi secara mutlak, namun Islam tetap

memerintahkan untuk bersikap santun terhadap siapa pun, termasuk terhadap anak-anak jalanan yang terlantar terutama anak-anak yatim.

Selain nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran,¹⁰⁰ sebagaimana adanya kewajiban bagi orangtua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.

Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa terdapat pola pengangkatan anak yang dikira oleh sebagian orang sebagai perbuatan yang dilarang ajaran Islam, padahal sesungguhnya tidak, yaitu tindakan seseorang yang mengambil anak-anak terlantar dan anak-anak yatim, diperlakukan seperti anaknya sendiri, dibangun, dididik, dan dicukupi semua kebutuhannya. Semua ini sangat dianjurkan dengan catatan tidak sampai mengadopsinya secara total, sehingga menganggap mereka bernasab kepada dirinya. Beliau menegaskan, selama hal ini tidak dilakukan, maka tindakan tersebut dinilai sebagai amal yang sangat terpuji dan pelakunya berhak mendapatkan jaminan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga.¹⁰¹

3. Larangan Mengingkari Nasab Anak

Seorang suami tidak boleh mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya sepanjang perkawinan yang sah. Pengingkaran seorang suami terhadap nasab

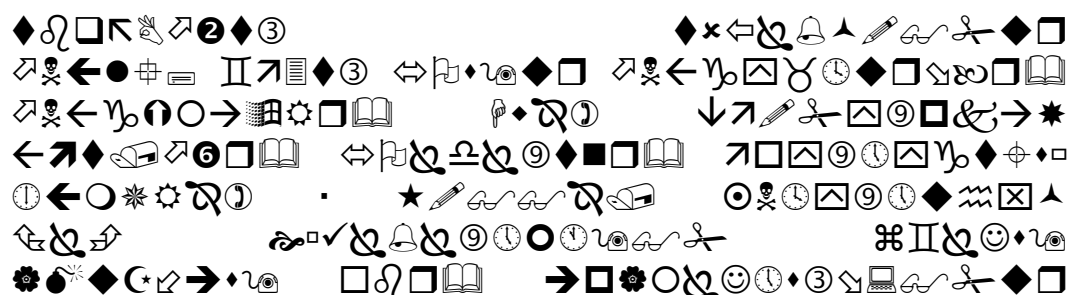
¹⁰⁰ Muhammad Yusuf Musa, *An-Nasab wa Atsaruh*, (Kaherah : Dar Al-Ma'rifah, 1967), Cet. ke-2, h. 7.

¹⁰¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Al-Qahirah : Maktabah Wahab, 1980), Cet. ke-4, h. 189.

anaknya akan membawa bahaya yang besar dan suatu aib yang sangat jelek, baik terhadap istri maupun anak itu sendiri.¹⁰² Oleh karena itu, seorang suami tidak dapat mengingkari anaknya karena suatu keraguan, dugaan atau karena ada berita tidak baik yang datang dari luar.

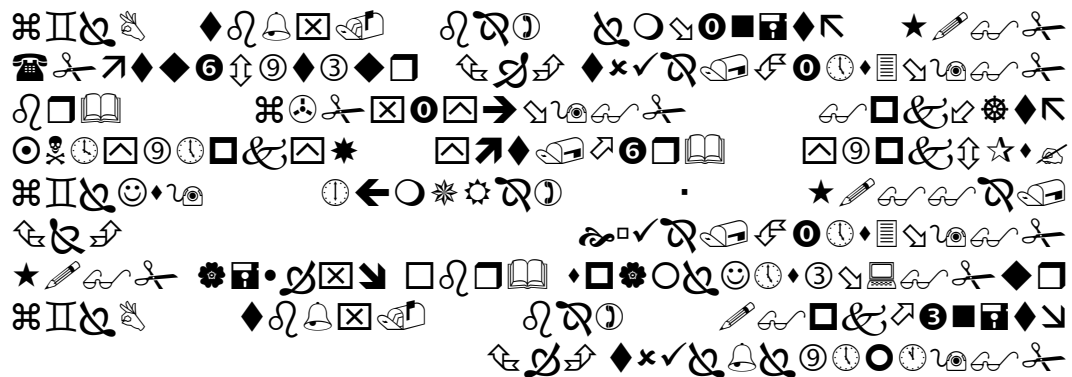
Adapun apabila seorang istri mengkhianati suami dengan beberapa bukti yang dapat dikumpulkan dan beberapa tanda (*qarinah*) yang tidak dapat ditolak, maka syariat Islam tidak membiarkan seorang ayah harus memelihara seorang anak yang menurut keyakinannya bukan anaknya sendiri dan memberikan waris kepada anak yang menurut keyakinannya tidak berhak menerimanya atau paling tidak anak yang selalu diragukan identitasnya sepanjang hidup.¹⁰³

Jika kasus seperti ini terjadi, Islam membuat jalan keluar bagi memecahkan problematika ini, yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*. Seorang suami mengingkari anaknya, padahal tiada bukti yang tegas, maka suami dapat mengajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan mengadakan *mula'ana* (sumpah dengan melaknat) antara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan di dalam surah An-Nur (24) ayat 6 hingga 9 yang berbunyi :



¹⁰² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terjemahan Oleh Mu'ammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), h. 307 dan 308.

¹⁰³ *Ibid.*



Artinya :

Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada Syara') bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahwa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar; dan sumpah yang kelima (harus ia berkata): Bahwa laknat Allah atasnya jika ia dari orang-orang yang dusta. Dan untuk menghindarkan hukuman siksa dari istri (yang kena tuduh) itu harus ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahwa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang dusta; dan sumpah yang kelima (harus ia berkata); bahwa kemurkaan Allah atasnya jika suaminya dari orang-orang yang benar.

4. Menyandarkan Nasab Kepada Selain Ayahnya

Sebagaimana Islam telah mengharamkan seseorang ayah mengingkari anaknya tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan, begitu juga Islam tidak mengizinkan seorang anak menyandarkan nasabnya kepada orang lain dan disebut bukan dengan panggilan ayahnya sendiri. Nabi SAW menilai perbuatan tersebut sebagai kemungkaran yang menyebabkan laknat dari Allah dan manusia.

Hal ini telah diriwayatkan dari atas mimbar oleh Ali r.a dari suatu lembaran yang ada padanya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda :

من ادعى الى غير أبيه وانتمى الى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. (متفق عليه)

Artinya :

“Siapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri atau membangsakan dirinya kepada keluarga lain, dia akan mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya ; Allah tidak akan menerimanya nanti di hari kiamat taubat maupun tebusannya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Saad bin Abi Waqqash dari Rasulullah SAW beliau bersabda :

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم أنه غير ابيه، فالجنة عليه حرام. (متفق عليه)

Artinya :

“Siapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁰⁴

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Fara'idh* bab “Orang Yang Bernasab Selain Ayahnya”, dan Imam Muslim dalam kitab *Iman* bab “Kondisi Orang Yang Membenci Ayahnya”.¹⁰⁵

F. Tes DNA Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab

Alat bukti adalah alat yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu perkara, pembuktian merupakan upaya hukum dengan menggunakan alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan tidak bisa

¹⁰⁴ Musthafa Al-Bugha, *Syarah Riadush Shalihin*, (Jakarta : Gema Insani, 2010), Cet. Pertama, jilid 3, h.728.

¹⁰⁵ *Ibid.*

diselesaikan tanpa adanya alat bukti, karena alat bukti merupakan alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam kaidah umum yang dipegang oleh para ulama', disepakati bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau memberi hukuman kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak. Kaidah umum yang dipakai oleh hampir semua sistem hukum yang ada biasanya juga disebut asas legalitas. Kaidah ini yang menjadi acuan utama, agar hak-hak yang seharusnya menjadi milik seseorang tidak jatuh ke tangan orang lain. Kaidah ini berlaku dalam hukum yang terkait dengan hak Allah maupun yang menyangkut hak hamba.

Dalam perkara apa saja, keberadaan proses pembuktian yang pada umumnya berlangsung di hadapan hakim dalam persidangan, menjadi kunci utama, kepada siapakah hak yang dipersengketakan akan diberikan. Salah satu perkara yang membawa konsekwensi hukum yang sangat kompleks adalah masalah penentuan nasab.

Pentingnya penetapan asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Pembuktian melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai bentuk *qarinah* yang mempunyai nilai keakuratan dan keotentikan lebih valid, hanya saja tes DNA lebih spesifik yaitu dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada dalam tubuh manusia. Pengkategorian tes DNA dengan *qarinah* atas asumsi bahwa format *qarinah* yang telah terkandung baik

dalam Al-Qur'an maupun hadits perlu diaktualisasikan agar dapat merespon perkembangan zaman.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi :¹⁰⁶

لا ينكر الأحكام بتغير

Artinya :

“Tidak diingkari ada perubahan hukum ekoran perubahan masa”

Kaidah ushul ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Dengan ini, akan tercermin fleksibilitas dan elastisitas proses suatu hukum.

Walaupun tes DNA merupakan alat bukti yang keotentikannya lebih kuat daripada bukti lainnya, tetapi keabsahan penggunaannya sebagai bukti dalam hal penentuan adanya hubungan nasab perlu dilihat terlebih dahulu. Jika dalam hal seorang pasangan suami istri ingin mengetahui nasabnya atau kepentingan hak kewarisan maka hal ini boleh, karena dalam hukum Islam garis keturunan (nasab) seseorang bisa dibenarkan dan diakui secara sah apabila orang tersebut terikat dalam hubungan pernikahan, dengan demikian tes DNA dalam menentukan hubungan keturunan bisa dijadikan sebagai bagian yang mendukung boleh tidaknya seseorang itu diakui sebagai nasabnya.

¹⁰⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fikih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 107.

Namun dalam penggunaannya sebagai alat bukti masih diperselisihkan para ulama'. Terdapat perbedaan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara pidana, misalnya pembunuhan, perkosaan (perzinaan) dan kasus lainnya, alat bukti hasil tes DNA tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti utama dalam memutuskan perkara dan hanya berfungsi menjadi alat bukti sekunder (penguat alat bukti primer) dan tidak dapat berdiri sendiri.¹⁰⁷ Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kecurangan dan rekayasa pelaku tindak pidana dalam memanipulasi alat bukti untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Sedangkan dalam perkara perdata misalnya dalam kasus penentuan nasab anak, dalam hal ini tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti primer dan dapat berdiri sendiri, dikarenakan DNA diambil langsung dari tubuh si anak dan dari tubuh orang tua yang bersengketa.

G. Akibat Hukum Anak Zina

1. Nasab dan keturunan

Menurut hukum Islam, posisi anak zina menyebabkan hubungan anak dan ayahnya terputus. Anak zina hanya dinasabkan kepada ibu saja, sedangkan hubungan nasab antara anak dan ayahnya sudah terputus karena tidak ada ada perkawinan antara orangtuanya dan hubungan kelamin yang menyebabkan ibunya

¹⁰⁷ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005), Cet. ke-2, h. 131.

hamil bukan berdasarkan pada salah sangka (*syubhah*), oleh sebab itu nasab anak itu tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya.¹⁰⁸

Nasab anak itu hanya kepada ibunya dan sanak saudara dari pihak ibunya saja, dan hanya dapat mewarisi harta dari pihak ibu saja. Begitu juga bagi ayah yang mengakui anak itu sebagai anaknya, meskipun setelah itu membuat pengakuan bahwa anak itu sebagai anaknya, anak itu hanya boleh dinasabkan dengan dibin atau binti kepada ibunya atau Abdullah.¹⁰⁹

2. Harta dan Warisan

Oleh karena anak zina ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, maka secara otomatis hak untuk mewarisi harta ayahnya tidak ada. Dalam hal ini, seorang anak zina hanya dapat mewarisi harta dari ibunya saja, karena nasabnya hanya kepada ibunya saja. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia menyatakan tentang status anak zina atau anak yang dikandung ibunya di luar pernikahan yang sah, yaitu *“Perempuan yang mengandung anak luar nikah harus dinikahkan tetapi anaknya tidak bisa dinasabkan kepada pria yang menghamilinya, tidak dapat harta dan warisan darinya, tidak menjadi mahram kepadanya dan pria itu tidak boleh menjadi walinya”*¹¹⁰ Oleh karena itu, waris-mewarisi bagi anak zina terhadap harta hanya bisa antara ibu dan anaknya.

Sementara itu dalam kondisi perkawinan batil, tidak akan menciptakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Misalnya, istri tidak akan dapat mas

¹⁰⁸ Che Maryam Ahmad, *Syariah dan Undang-undang : Satu Perbandingan*, (Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 2004), h. 258.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Mohd Tamyas Abd. Wahid, *Anak Tak Sah Taraf Mengikut Hukum Syara'*, (Selangor : Golden Book Center Sdn. Bhd, 2008), h. 11.

kawin melainkan telah terjadi hubungan kelamin antara keduanya, kematian salah seorang dari keduanya tidak akan mewarisi pusaka suami atau istri, demikian juga halnya dengan anak. Anak itu tidak dapat mewarisi harta warisan ayahnya karena ia adalah anak yang tak sah taraf kepada ayahnya.¹¹¹

Di dalam perkawinan fasid, jika anak itu lahir dalam periode yang dapat mengesahatarfkannya, dan bisa dinasabkan kepada ayahnya, maka anak tersebut dapat mewarisi harta ayahnya, tetapi ibunya tidak akan mendapatkan hak yang demikian itu, ia tidak berhak untuk mendapat harta ayah anak tersebut.

Dalam persetubuhan syubhat, di mana anak yang dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka anak itu juga berhak mendapat nafkah, hak pemeliharaan dan warisan dari ayahnya.¹¹²

3. Perwalian

Disebabkan karena nasab anak zina tidak bisa digariskan dengan ayahnya, maka hak perwalian atas diri anak perempuan dari anak zina juga tidak dipegang oleh ayahnya. Hak perwalian anak perempuan dari hasil zina akan diserahkan kepada ibunya yaitu biasanya perwalian nikahnya, akan ditempatkan pada wewenang wali hakim untuk menikahkannya.¹¹³

Sejalan dengan hal ini, karena nasab anak zina tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, maka secara tidak langsung, hak perwalian yang ada pada anak laki-laki dari anak zina juga akan gugur sama sekali. Yakni mereka tidak bisa

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid*, h. 13.

¹¹³ Siti Zulaika Mohd. Nor, *Perlindungan Kanak-kanak Dalam Islam : Perlaksanaannya Menurut Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Puataka, 1971), h. 55.

menjadi wali pada perkawinan saudara perempuan mereka, baik sah taraf dan tak sah taraf.

4. Hak pengasuhan (*hadhanah*)

Menurut Undang-undang Keluarga Islam, hak pengasuhan anak atau *hadhanah* adalah dianggap sebagai hak antara anak dan orangtuanya, terutama sekali dengan ibunya.¹¹⁴ Seseorang anak itu membutuhkan perlindungan dari ayahnya dan penjagaan ibunya. Tapi jika anak itu masih kecil, maka hak pemeliharaan akan jatuh kepada ibunya.

Hak pemeliharaan kepada ibu ini akan berkelanjutan sampai anak-anak itu *baligh*, dan *mumaiyyiz*. Setelah selesai *hadhanah* oleh ibu, hak tersebut akan menurun kepada ayahnya dan anak itu berhak untuk memilih apakah tinggal dengan ibu atau ayahnya.¹¹⁵

Namun kondisi anak tak sah taraf yang dalam hal ini anak zina, kondisi berbeda dengan anak yang sah yang lahir dari perkawinan yang sah pula. Di mana dalam Pasal 85 Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984, menetapkan bahwa penjagaan anak-anak yang tak sah taraf adalah semata-mata kepada ibu dan saudara dari pihak ibunya. Dan hak *hadhanah* yang ada pada ibu ini tidak akan habis, dan tidak menurun kepada ayahnya, bahkan hak *hadhanah* akan menurun kepada saudara sebelah ibunya saja.¹¹⁶

¹¹⁴ Pasal 85 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaysia.

¹¹⁵ Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan), 1984, Pasal 84 (1) dan (2), Undang-undang Malaysia, Akta 303.

¹¹⁶ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2000 (Warta Kerajaan Negeri Kelantan), h.89.

H. Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Tentang Kesahtarafan Anak

Seksyen 109 adalah enakmen yang membicarakan tentang siapakah yang dikaitkan sebagai bapa. Ianya menyebutkan :

“Jika seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak dalam masa enam bulan atau lebih dari tarikh perkahwinan itu, atau dalam jangka masa yang boleh diterima oleh hukum Syara' selepas perkahwinan itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh menafikan, dengan cara *li'an* mengikut hukum Syara', bahawa anak itu adalah anaknya”.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENGESAHAN NASAB ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Putusan Hakim Tentang Pengesahan Nasab Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012.

Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif yang secara teori bersifat independent berfungsi mengadili berbagai hal yang ada di tengah masyarakat. Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif mengadili perkara hukum di lingkungan privat (pribadi) khususnya kasus-kasus yang lahir dalam rumah tangga misalnya di bidang perkawinan, perceraian, rujuk, waris dan sebagainya. Secara hukum, keluarga yang berperkara dapat menemukan jalan penyelesaian akhir di Mahkamah Syariah tersebut, misalnya kasus penetapan nasab anak. Ketika antara suami dan istri dilanda konflik atau kebuntuan mengenai status anak, jalan yang terbaik yang ditempuh adalah membawa permohonan kasus ke pengadilan.

Bab ini penulis memfokuskan pada aplikasi putusan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu terhadap kasus permohonan pengesahan nasab atau taraf anak bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan dua detik setelah pasangan suami istri menikah.

Di dalam kasus yang diteliti penulis, pemohon telah mendaftarkan satu permohonan kepada pengadilan pada 17 Juni 2012 dan disidangkan kali pertama pada 24 Juni 2012. Permohonan tersebut adalah merupakan permohonan agar pengadilan melakukan konfirmasi bahwa seorang bayi perempuan yang diberi

nama Nur Damia Aqilla binti Abdullah¹¹⁷, Nomor Sertifikat Kelahiran 100903-11-0568 (Nomor Daftar CH 73754), adalah anak sah taraf mengikut Hukum Syara' bagi pasangan Noor Aini binti Nasron, KTP : 891101-11-5758 dengan Zafrin Zulhilmi bin Pauzi, KTP : 910411-11-5025, sebagai pemohon.¹¹⁸

Hasil wawancara penulis terhadap responden, penulis menemukan bahwa bayi perempuan tersebut lahir pada 3 September 2010, pada jam 8.37 pagi di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, oleh Noor Aini binti Nasron. Kasus ini telah disidangkan pada hari Selasa tanggal 13 Sya'ban 1433 bersamaan 3 Juli 2012.¹¹⁹

Dalam permohonan tersebut, pemohon adalah seorang pekerja buruh yang berdomisili di alamat 1283 Kampung Seberang Baruh, Chabang Tiga, 21000 Kuala Terengganu. Sedangkan responden adalah ibu rumah tangga penuh waktu.¹²⁰

Pemohon di dalam permohonan ini telah diakadnikahkan dengan Noor Aini binti Nasron (responden) pada 1 Jamadil Awwal 1431 bersamaan 16 April 2010 dengan berwalikan ayah kandung responden bernama Nasron bin Che Mat. Sejak perkawinan mereka, pemohon dan responden tinggal bersama sebagai suami istri dan belum pernah bercerai. Mereka menetap di alamat 1283 Kampung

¹¹⁷ Dari sudut penamaan anak zina, jika seseorang perempuan beragama Islam hidup bersama tanpa nikah dengan pasangannya apakah laki-laki tersebut beragama Islam atau bukan Islam dan melahirkan anak, maka anak tersebut hendaklah dinasabkan dengan Abdullah atau lain-lain nama *Asma' al-Husna* berpangkalkan Abdul.

¹¹⁸ Data Putusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu, No. Kasus 11300-006-0033-2012, Tahun 2012, 7 Agustus 2012, h. 1.

¹¹⁹ Noor Aini Nasron (Responden), *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2013.

¹²⁰ Noor Aini Nasron, *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2013.

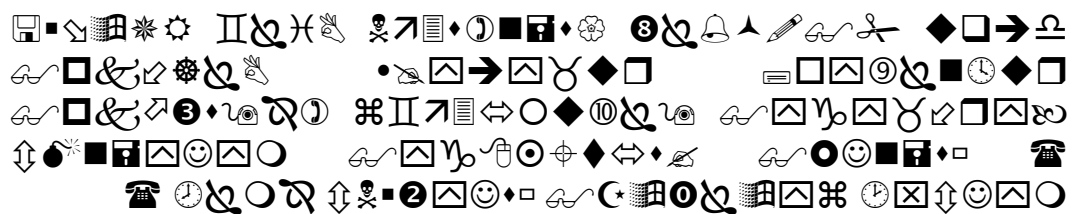
Seberang Baruh, Chabang Tiga, 21000 Kuala Terengganu.¹²¹ Responden tidak membantah permohonan pemohon, bahkan turut mendukung permohonan supaya seorang anak perempuan yang diberi nama Nur Damia Aqilla binti Abdullah dinasabkan sebagai anak sah taraf mengikut hukum Syara' kepada pemohon.

Dari segi fakta, di dalam permohonan tersebut pemohon telah memohon agar pengadilan melakukan konfirmasi bahwa bayi perempuan yang dilahirkan istrinya yang diberi nama Nur Damia Aqilla binti Abdullah, adalah anak sah taraf mengikut hukum Syara'.

Dalam menafsirkan nasab, Enakmen Undang-Undang Administrasi Keluarga Islam Terengganu 1985, bagian 2, mendefinisikan :

“Nasab artinya keturunan melalui pertalian darah yang sah menurut hukum Syara”.

Merujuk kepada sumber utama hukum Syara' tentang persoalan nasab ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raaf (7) : 189 :



Artinya :

“Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu, dan Ia mengadakan dari hakikat itu pasangannya (diri suami istri), untuk bersenang-hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencampuri istrinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan”.

¹²¹ Noor Aini Nasron, Wawancara, Tanggal 25 Februari 2013.

Untuk merealisasikan ketentuan hukum Syara' itu, bagian 109 Enakmen Undang-Undang Administrasi Keluarga Islam, (Terengganu) 1985 mengalokasikan :

“Jika seorang perempuan yang menikah dengan seorang pria melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari tanggal pernikahan, atau dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh hukum Syara' setelah pernikahan itu dibubarkan apakah oleh sebab kematian pria itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak menikah kembali, maka pria itu akan dianggap sebagai ayah anak itu, tapi pria itu dapat menyangkal, dengan cara li'an menurut hukum Syara', bahwa anak itu adalah bukan anaknya”.¹²²

Undang-undang hanya mengalokasikan, 'Jika seorang perempuan yang berkawin dengan seorang pria melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari tanggal pernikahan itu maka orang itu akan dianggap sebagai ayah anak itu'. Dari perspektif hukum Syara' pula ia memberikan tambahan syarat kepada kelahiran dalam tempoh enam bulan dua detik (*lahzoh*) dari tanggal akad nikah pernikahan dengan dua ketentuan. Ketentuan pertama adalah dalam perkawinan tersebut, suami mampu tinggal bersama istrinya itu sebagai suami istri. Ketentuan kedua suami tersebut mampu melakukan hubungan seksual dengan istrinya itu.¹²³

Untuk memenuhi persyaratan hukum Syara' dan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, dalam permohonan ini, timbul pertanyaan, apakah responden telah diakad nikah dengan pemohon secara sah. Menurut keterangan pemohon dan responden serta keterangan dokumen yang diberikan ke

¹²² Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu 1985, Pasal 109 *Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001*, (Terengganu : Percetakan Nasional Malaysia Berhad Cawangan Terengganu, 2001), h. 21.

¹²³ *Ibid.*

dalam pengadilan, hakim¹²⁴ meyakini bahwa responden telah diakad nikah dengan pemohon secara sah menurut hukum Syara' pada 1 Jamadil Awwal 1431 bersamaan 16 April 2010 dengan berwalikan bapa kandung responden bernama Nasron bin Che Mat. Akad nikah perkawinan pemohon dengan responden itu telah terdaftar dengan registrasi nomor 11-0501-2010-1205429, oleh Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Daerah Kuala Terengganu, Haji M. Rozi bin Haji Bidin.¹²⁵

Menurut hitungan taqwim hakiki¹²⁶, hakim memutuskan responden telah diakad nikahkan dengan pemohon pada 2 Jamadil Awwal 1431. Temuan fakta ini didasarkan pada metode awal hari dalam Taqwim Hijri yang dihitung dari waktu Maghrib.

Persoalan berikutnya adalah tanggal bayi yang menjadi soal dilahirkan. Menurut keterangan yang diberikan termasuk keterangan dokumen, bayi yang menjadi soal itu telah dilahirkan pada 3 September 2010 pada jam 08.37 pagi di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, Terengganu. Menurut taqwim hakiki, bayi tersebut lahir pada 24 Ramadhan 1431 H.

Berdasarkan fakta-fakta yang diteliti, pengadilan telah membuat perkiraan waktu bayi perempuan tersebut berada dalam kandungan sampai waktu ia dilahirkan oleh responden. Periode tersebut dihitung dari waktu responden diakad

¹²⁴ Dato' Ismail Bin Yahya (Ketua Hakim Syari'e), merangkap hakim yang bersidang pada kasus permohonan pengesahan taraf anak tanggal 7 Agustus 2012.

¹²⁵ Nor Hafizah, (Penolong Pegawai Syariah), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Tanggal 26 Februari 2013.

¹²⁶ Yang dimaksudkan dengan taqwim hakiki ialah, Taqwim Hijri dan Waktu Solat 1431H Kerajaan Negeri Terengganu, yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu.

nikahkan dengan pemohon. Perkiraan ini dibuat oleh pengadilan menurut Taqvim

Hakiki tahun 1431H. Perkiraananya adalah seperti berikut :¹²⁷

Bulan	Hitungan bulan / hari
1) 1 Jamadil Awwal 1431 (tanggal akad nikah) 29 Jamadil Awwal 1431, bersamaan 16 April 2010 – 14 Mei 2010	1 bulan
2) 1– 30 Jamadil Akhir 1431 bersamaan 15 Mei – 13 Juni 2010	1 bulan
3) 1- 29 Rajab 1431 bersamaan 14 Juni – 12 Juli 2010	1 bulan
4) 1 – 29 Syaaban 1431 bersamaan 13 Juli – 10 Agustus 2010	1 bulan
5) 1 – 30 Ramadhan 1431 bersamaan 11 Agustus – 9 September (bayi lahir 3 September 2010 bersamaan 24 Ramadhan 1431)	24 hari

Berdasarkan perhitungan di atas, penulis menemukan bahwa bayi perempuan tersebut berada dalam kandungan sehingga bayi tersebut dilahirkan

¹²⁷ Putusan Hakim, *Op. Cit*, h. 12.

oleh responden dari waktu akad nikah perkawinan pemohon dengan responden adalah selama empat bulan 24 hari saja. Dalam perkawinan responden dengan pemohon sampai tanggal bayi perempuan itu dilahirkan oleh responden, hakim memutuskan bahwa pemohon sebagai suami selalu mampu tinggal bersama responden sebagai suami istri dan mampu melakukan hubungan seksual dengan istrinya itu.¹²⁸

Dalam permohonan tersebut, waktu akad nikah perkawinan pemohon dengan responden sehingga responden melahirkan bayi menjadi persoalan karena periode tersebut hanya empat bulan 24 hari saja. Selama empat bulan 24 hari itu tidak terpenuhi syarat cukup waktu menasabkan bayi yang dilahirkan itu kepada pemohon menurut hukum Syara', yaitu enam bulan dua *lahzoh* dari waktu akad nikah perkawinan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Alasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Tentang Masalah Nasab Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012.

Dalam kasus yang diteliti penulis, hakim Dato' Haji Ismail bin Yahya di dalam kasus permohonan tersebut telah memutuskan hal ini dengan menetapkan bahwa anak yang lahir kurang enam bulan dari waktu suami dan istri diakad nikahkan sampai melahirkan, bisa dinasabkan kepada pria tersebut pada beberapa faktor.

¹²⁸ Ismail Yahya (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kasus pengesahan taraf anak), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Tanggal 26 Februari 2013.

Pertamanya, beliau setuju dengan pendapat dan pandangan Sheikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmuk Fataawa*, sebagaimana disebutkan :¹²⁹

واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا ؟ على قولين . كما ثبت عن النبي أنه الحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبه بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد ابن زمعة، فقال سعد: ابن أخي . عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجني منه يا سودة). لما رأى من شبهه البين بعتبه، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة. وقد تنازع العلماء في ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد. وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدر فيه ولا على وجه المتابعة له فيهما فإن ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة.

Artinya :

“Ulama’ telah berbeda pendapat di dalam masalah klaim seorang pria untuk menasabkan anak zinanya sedangkan ibu anak itu bukan istri orang atau hamba yang dimiliki, pada dua pendapat. Sebagaimana telah sabit dari Nabi SAW bahwa baginda telah menyerahkan putra yang dilahirkan oleh budak Zam’ah bin Al-Aswad bin Zam’ah Ibnu Al-Aswad kepada Abdun. Hamba tersebut pernah disetubuhi oleh Utbah Ibnu Abi Waqqas. Lalu anak itu menjadi rebutan di antara Saad Ibnu Abi Waqqas (saudara kepada Utbah) dengan Abdun Ibnu Zam’ah (anak kepada

¹²⁹ Ahmad Ibnu Taimiyyah, *Majmuk Fataawa*, (Lebanon : t.t, 1994), jilid 32, h. 137.

Zam'ah). Berkata Saad : “Dia adalah anak saudaraku. Saudaraku telah berwasiat kepadaku bahwa anak yang lahir ini adalah anaknya”. Lalu berkata Abdun, “Dia adalah saudaraku dan anak kepada hamba perempuan ayahku, dia dilahirkan pada ‘hamparan’ ayahku”. Maka Rasulullah SAW bersabda : “Tuntutan ini mendukung awak, wahai Abdun Ibnu Zam'ah. Anak adalah milik pemilik hamparan (suami atau pun tuan kepada hamba), dan orang yang berzina dengan hamba itu terhalang haknya ke atas anak itu. Wahai Saudah harus engkau berhijab darinya”. Kemudian ketika baginda melihat persamaan nyata di antara anak itu dengan Utbah, maka baginda membuat dia saudara kepada Saudah dalam pewarisan tetapi tidak pada kemahraman.

Dan telah berselisih ulama' pada masalah apakah bisa dimerdekakan dengan kepemilikan, ada dua pendapat di dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Persoalan ini terlalu panjang untuk dibahas dalam aktikel ini, dan persoalan yang lemah seperti ini tidak ada seorang pun yang mengisahnkannya dari imam-imam muslimin, tidak melalui kisah celaan padanya, maupun di atas dasar untuk mengikutnya. Karena sesungguhnya yang demikian itu langkah untuk mencegah dari mencela para imam dan juga mencegah dari mengikuti pendapat-pendapat yang lemah”.

Hadits yang berarti, ‘Anak adalah milik pemilik hamparan (suami atau tuan kepada hamba), dan orang yang berzina dengan hamba itu terhalang haknya ke atas anak itu’, sebagaimana dalam pendapat di atas dapat diambil matannya dari matan hadis ke 2273, Sunan Abu Daud.¹³⁰

Beliau juga berpendapat sebagaimana pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan, ketika membahas persoalan pensabitan nasab bagi anak zina, seperti yang terdapat di dalam kitab *Al-Mufasssol fi Ahkamil Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'atil Islamiyyah*, sebagaimana disebut :¹³¹

¹³⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Lebanon, t.t) jilid 2, h. 554.

¹³¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol fi Ahkamil Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'atil Islamiyyah*, (Beirut, Lebanon : 1417H/1997M), jilid 9, h. 384.

والراجح أن ولد الزنى لا يثبت نسبه من الزاني سواء تزوج بمزنيته وهي حامل فجاءت بولد لأقل من ستة شهر من وقت عقد النكاح، أو لم يتزوجها، وجاءت بولد، ولكن إذا استلحقه بأن ادعاه ولم يقل إنه ولده من الزنى، فإنه يثبت نسبه منه في أحكام الدنيا، وكذلك لو تزوج بمزنيه وهي حامل منه من الزنى فجاءت بولد لأقل من أدنى مدة الحمل وسكت أو ادعاه ولم يقل إنه من الزنى، فإن نسبه يثبت في أحكام الدنيا

Artinya :

*“Pendapat yang lebih kuat menegaskan bahwa anak zina tidak dihukum nasabnya kepada pria pezina apakah pria pezina itu berkawin dengan perempuan yang dizina yang hamil itu dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah perkawinan, atau pun tidak berkawin, yang kemudian melahirkan anak zina. Namun jika pria pezina itu menuntut keyakinan anak zina itu kepadanya dengan dia tidak menyatakan yang anak itu adalah anak dari perbuatan zinanya, maka anak itu harus dinasabkan kepada pria pezina itu menurut undang-undang atau peraturan keduniaan. Demikian juga posisi hukumnya jika pria itu berkawin dengan perempuan yang dizina yang hamil dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah perkawinan, yang mana lelaki itu berdiam diri atau dia menuntut keyakinan anak zina itu kepadanya dengan dia tidak menyatakan yang anak itu adalah anak dari perbuatan zinanya, maka anak itu harus dinasabkan kepada pria pezina itu berdasarkan pada peraturan keduniaan”.*¹³²

Ketentuan Pasal 2 Enakmen Undang-Undang Administrasi Keluarga Islam

Terengganu 1985, dalam membuat interpretasi atas pengertian ‘tak sahtaraf’, bertepatan dengan sebagian dari pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan di atas. Ia mengalokasikan :

“Tidak sahtaraf berhubungan dengan seseorang anak, artinya dilahirkan di luar pernikahan tetapi bukan hasil daripada persetubuhan syubhat”.

¹³² Yang dimaksud peraturan-peraturan keduniaan adalah seperti urusan pendaftaran kelahiran anak, urusan persekolahan, urusan perkawinan dan sebagainya.

Menurut wawancara penulis dengan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Dato' Ismail Bin Yahya, ia menyatakan, oleh karena di negara Malaysia pihak pendaftaran enggan mendaftarkan anak orang Islam dengan dibinkan kepada bapanya jika waktu pernikahan mereka kurang dari enam bulan, maka hakim telah memutuskan agar anak yang lahir kurang dari jangka waktu enam bulan tetap dinasabkan kepada pria yang menjadi ayah dari anak tersebut untuk menghindari anak tersebut tidak diakui nasabnya.¹³³ Menurut beliau, jika seseorang anak tidak diakui nasabnya, ia akan menimbulkan berbagai masalah pada anak tersebut ketika sudah dewasa kelak. Misalnya, ketika ingin menikah, anak tersebut sudah pasti sulit untuk mendapatkan wali bagi pihaknya.¹³⁴

Dalam arti kata lain anak tersebut dianggap '*anak luar nikah*'. Hasil dari aturan ini maka banyak anak yang tidak dibinkan kepada ayah mereka. Lebih menyedihkan ketika anak tersebut merasa hanya dirinya yang tidak berbinkan kepada ayahnya sedangkan adik-beradiknya yang lain berbinkan ayahnya. Ini merupakan satu tekanan kepadanya yang tidak berdosa dalam hal tersebut.¹³⁵

Pihak orangtua pula amat sulit untuk menjelaskan masalah tersebut kepada anak mereka karena itu akan membuka aib yang telah coba ditutup. Selain itu, bisa menghilangkan rasa hormat anak kepada orangtua yang telah insaf dan sedang membangun dan mendidik keluarga. Atas kondisi tersebut, maka, masalah ini dibahas dalam Fatwa Negeri Perlis. Setelah meneliti dalil-dalil syara' dan

¹³³ Ismail Yahya, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2013.

¹³⁴ Ismail Yahya, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2013.

¹³⁵ Ismail Yahya, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2013.

alasan-alasan para sarjana yang berbagai, maka keputusan menasabkan anak yang kurang dari masa enam bulan tersebut dibuat.¹³⁶

Jadi, menurut hakim tersebut, kebaikan yang diperoleh dari putusan tersebut adalah untuk menutup keaiban lalu yang terjadi pada pasangan yang sudah menikah dan bertobat, menghilangkan perasaan malu dan terasing anak yang selama ini tidak dibinkan kepada ayahnya karena faktor kurangnya waktu perkawinan dan membantu orangtua yang terlanjur melanjutkan kehidupan dan pembangunan keluarga.¹³⁷

Malaysia adalah sebuah negara hukum yang memiliki aturan-aturan khusus demi kesejahteraan rakyat. Seseorang diakui sebagai warga Malaysia, hanya apabila memiliki persyaratan tertentu seperti Kad Pengenalan (KTP)¹³⁸. Dengan KTP tersebut yang disingkat dengan makna Negara Malaysia akan mengakui seseorang sebagai orang yang mendapat perlindungan hukum sepenuhnya sebagai warga negara. KTP hanya bisa dimohon ketika seseorang berusia 12 tahun. Sebelum itu, dipergunakan Sertifikat Kelahiran sebagai identitas seseorang. Dalam pemasalahan anak luar nikah atau anak tidak sah taraf, ada sesuatu yang berbeda pada sertifikat kelahiran anak luar nikah. Perbedaan tersebut terdapat pada nomor sertifikat yang biasanya tertera di bagian kanan dokumen,

¹³⁶ Ismail Yahya, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2013.

¹³⁷ Ismail Yahya, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2013.

¹³⁸ Kad Pengenalan adalah kartu tanda penduduk bagi warga negara Malaysia.

cetak di bagian bawah. Ini menunjukkan bahwa pemiliknya tidak mengetahui ayah kandungnya.¹³⁹

Sertifikat Kelahiran merupakan bukti otentik atas identitas kelahiran seseorang. Sertifikat Kelahiran memiliki arti yang sangat penting terutama dalam perspektif hukum, baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun untuk ketertiban administrasi negara dalam bidang kependudukan. Selain itu, akta kelahiran juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang otentik dalam pengurusan paspor, kewarganegaraan, kartu tanda penduduk, keperluan sekolah atau kuliah, bekerja, tunjangan anak dan akta kelahiran ini diakui secara internasional.¹⁴⁰

Hakim yang memutuskan kasus permohonan ini menegaskan pemohon telah kawin dengan responden. Namun apa yang menjadi pertanyaannya adalah bayi perempuan tersebut dilahirkan oleh responden empat bulan 24 hari setelah waktu diakad nikahkan pemohon dengan responden.

Jika dilihat pada periode bayi tersebut dilahirkan, dari saat pasangan suami istri tersebut diakad nikahkan, bayi itu tidak terpenuhi syarat untuk dinasabkan kepada pemohon. Dalam persoalan ini hakim berpendapat, pendapat yang lebih kuat sebagai mana yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di atas itu hendaklah diperguna. Ini berarti apabila pemohon menuntut disahkan seorang bayi perempuan dilahirkan oleh responden empat bulan 24 hari setelah waktu diakad nikahkan pemohon dengan responden, dan pemohon tidak menyatakan yang anak

¹³⁹ Ismail Yahya, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2013.

¹⁴⁰ Tuan Shahroni Sanusi, *Pendaftaran Mahkamah Seksyen Shah Alam*, (Selangor Darul Ehsan : Pustaka Seri Intan SDN. BHD, 1999) h. 29.

itu adalah anak dari perbuatan zinanya, maka anak itu harus dinasabkan kepada pemohon berdasarkan hukum atau peraturan keduniaan.¹⁴¹

Hasil dari wawancara, hakim berpendapat, dalam kasus seperti ini, anak tersebut bisa diberi nasab kepada pemohon karena undang-undang dan peraturan-peraturan keduniaan membenarkan. Oleh yang demikian, atas permohonan pemohon, hakim telah memutuskan bahwa bayi yang telah dilahirkan oleh responden pada 3 September 2010, jam 08.37 pagi di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, yang telah diberi nama Nur Damia Aqilla binti Abdullah adalah anak kepada Zafrin Zulhilmi bin Pauzi yaitu pemohon, mengikut undang-undang atau peraturan keduniaan.¹⁴²

Hakim tersebut telah memutuskan bahwa menurut kehendak ketentuan hukum Syara', bayi tersebut menjadi anak kepada Zafrin Zulhilmi bin Pauzi dan harus didaftarkan oleh Pendaftar Kelahiran dan Kematian Terengganu.

Hakim mendapatkan alokasi bagian-bagian 13 dan 13A, Undang-undang Pendaftaran Kelahiran Dan Kematian 1957 (Akta 299), memberikan alokasi kepada Pendaftar Kelahiran dan Kematian untuk mendaftar nama Nur Damia Aqilla binti Abdullah dengan nama Zafrin Zulhilmi bin Pauzi sebagai ayah Nur Damia Aqilla. Hakim tersebut memutuskan bahwa menurut hukum Syara' dan Akta Catatan Kelahiran Dan Kematian 1957 (Akta 299), bahwa Nur Damia Aqilla binti Abdullah harus didaftarkan dengan nama Zafrin Zulhilmi bin Pauzi sebagai ayahnya. Pemohon dan responden harus memenuhi terlebih dahulu apa-apa

¹⁴¹ Ismail Yahya, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2013.

¹⁴² Putusan Hakim, *Op. Cit*, h. 18.

pengaturan yang harus diikuti untuk memenuhi kehendak hukum itu sebelum pendaftaran dapat dilakukan.¹⁴³

Bagian 13, Undang-undang Pendaftaran Kelahiran Dan Kematian 1957

(Akta 299), menetapkan :

“Apapun yang terkandung dalam ketentuan sebelumnya di dalam undang-undang ini, dalam hal anak tak sah taraf, tidak seorang pun sebagai ayah dari anak itu diminta memberi informasi berkenaan dengan kelahiran anak itu, dan Pendaftar harus tidak mencatat ke dalam daftar nama setiap orang sebagai ayah anak itu kecuali atas permintaan bersama oleh ibu dan orang yang mengaku dirinya sebagai ayah anak itu, dan orang itu harus dalam hal tersebut menandatangani daftar itu bersama dengan ibu anak itu”.

Bagian 13A, undang-undang yang sama menyebut :

(1) Nama keluarga, jika ada, yang akan dicatat berkenaan dengan anak sah taraf harus secara biasanya membuat nama ayah sebagai nama keluarganya, jika ada.

(2) Nama keluarga, jika ada, yang harus dicatat berkenaan dengan anak tak sah taraf dapat jika ibunya adalah pemberitahu dan secara sukarela memberikan informasi itu, membuat nama ibunya sebagai nama keluarganya; dengan ketentuan bahwa jika orang yang mengaku dirinya menjadi ayah anak itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 meminta sedemikian, maka nama keluarga bolehlah ditaruh pada nama keluarga orang itu.

Tekait dengan kasus tersebut, pemberian nasab anak yang tidak cukup enam bulan dua detik untuk pemohon menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dan permasalahan tersebut dianalisa sesuai analisis hukum Islam. Penulis menemukan Undang-undang Administrasi Keluarga Islam (Terengganu) 1985

¹⁴³ Putusan Hakim, *Op. Cit*, h. 19.

sesuai dengan hukum Syara' dalam membahas tentang persoalan nasab anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 109 yang berbunyi :

“Jika seorang perempuan yang menikah dengan seorang pria melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari tanggal pernikahan, atau dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh hukum Syara' setelah pernikahan itu dibubarkan apakah oleh sebab kematian pria itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak menikah kembali, maka pria itu akan dianggap sebagai ayah anak itu, tapi pria itu dapat menyangkal, dengan cara li'an mengikut hukum Syara', bahwa anak itu adalah bukan anaknya”.

Namun yang menjadi permasalahan adalah verifikasi oleh hakim tentang pemberian nasab kepada pemohon di mana bayi yang dilahirkan oleh responden tidak memenuhi persyaratan hukum Syara' maupun Undang-undang Administrasi Keluarga Islam Terengganu, karena bayi tersebut berada di dalam kandungan ibunya sejak ibunya diakad nikahkan sehingga ia dilahirkan hanyalah empat bulan 24 hari. Sedangkan hukum Islam telah menetapkan bahwa batas minimal bayi di dalam kandungan bagi penetapan nasab adalah dalam waktu enam bulan. Di dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh*, para fuqaha' telah sependapat menyatakan bahwa waktu hamil yang minimal adalah enam bulan yang dihitung dari saat bersetubuh dan waktu yang memungkinkan terjadi persetubuhan pada pendapat jumhur.¹⁴⁴

Oleh yang demikian, mengenai status anak, akan ditentukan melalui usia perkawinan tersebut sehingga melahirkan. Jika usia perkawinan itu melewati enam bulan ke atas, maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika bawah dari

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Terjemahan Oleh Ahmad Shahbani Salamon, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), jilid 7, h. 849.

enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya dan anak itu akan dibinkan atau dibintikan kepada Abdullah atau nama-nama *Asma'ul Husna* yang lain, anak itu juga tidak bisa mewarisi harta ayahnya itu.¹⁴⁵

Muzakarah Komisi Fatwa Majelis Nasional Untuk Urusan Agama Islam Malaysia Kali Ke-1 yang bersidang pada 28 dan 29 Januari 1981 telah membahas Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah). Muzakarah telah memutuskan bahwa anak zina atau anak di luar nikah (anak tak sah taraf) apakah diikuti dengan pernikahan kedua pasangan orangtuanya atau tidak harus dibin atau dibintikan kepada Abdullah.¹⁴⁶

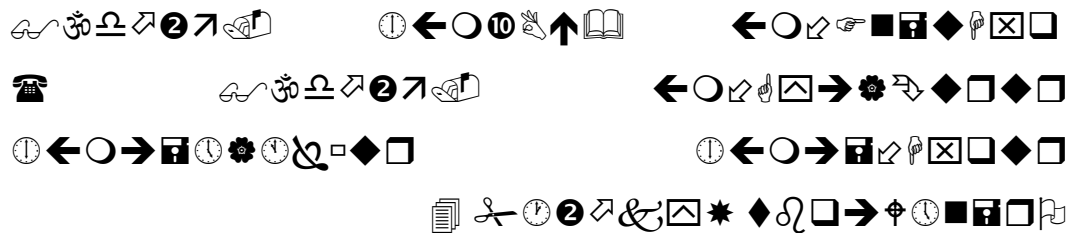
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Tentang Pengesahan Nasab Anak Pada Kasus Nomor 11300-006-0033-2012

Berkaitan dengan kasus permohonan pengesahan nasab anak yang kurang enam bulan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dan permasalahan tersebut dianalisa sesuai hukum Islam. Adapun fakta permasalahan yang dianalisis sesuai hukum Islam yaitu hakim tersebut telah memutuskan hal tersebut dengan tidak berlandaskan dalil hukum Syara' yang sah. Ini karena, di dalam hukum Syara', Islam telah menetapkan waktu yang diakui untuk menentukan sah nasab seseorang anak adalah enam bulan sebagaimana berikut.

¹⁴⁵ Mohd Asri Zainal Abidin, *Nasab : Kandungan Kurang Enam Bulan*, (Perlis : Pustaka Abadi, 2011), h. 27.

¹⁴⁶ <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/penamaan-anak-tak-sah-taraf-anak-luar-nikah>. Diakses pada 8 April 2013.

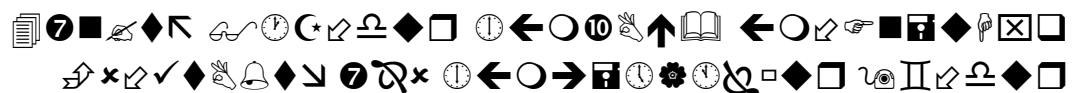
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahqaaf (46) : 15 yang berbunyi :



Artinya :

“Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang masa mengandungnya beserta dengan periode menceraikan susunya adalah dalam waktu tiga puluh bulan”.

Dalam firman-Nya yang lain pada QS. Luqman (31) ayat 14 Allah SWT berfirman :



Artinya :

“Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal kehamilan sampai akhir menyusunnya), dan periode menceraikan susunya adalah dalam masa dua tahun”.

Ayat 15 Surah Al-Ahqaaf di atas menjelaskan selama kehamilan sampai periode menceraikan susu adalah 30 bulan, sementara ayat 14 Surah Luqman pula menjelaskan bahwa periode menceraikan susu adalah dua tahun yaitu 24 bulan. Oleh yang demikian tempoh sependek-pendek hamil atau mengandung yang diakui oleh hukum Syara' ialah enam bulan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Hakim tersebut telah membuat pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan sebagai sumber dalam memutuskan hal tersebut. Padahal, jika diteliti pada masa sekarang, Dr. Abdul Karim Zaidan bukanlah ulama' yang mujtahid. Sedangkan ada banyak pendapat-pendapat dari ulama' mujtahid yang membahas tentang masalah nasab. Sepakat ulama' menyatakan anak yang kurang enam bulan dari masa orangtuanya menikah sehingga dia dilahirkan, tidak bisa dinasabkan kepada pria yang menikahi ibunya. Pria yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.¹⁴⁷ Putusan hakim tersebut dapat menyebabkan masalah lain yang akan timbul pada masa akan datang, karena ketika ayah telah mengakui anak tersebut adalah anaknya, tidak bisa mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan. Hal ini sangat dikhawatirkan ketika ayahnya menjadi wali nikah anak tersebut. Sedangkan anak tersebut tidak bisa menerima warisan dari ayahnya dan tidak bisa menjadi wali pernikahannya.

Adapun pendapat hakim yang lainnya di pengadilan tersebut adalah bertentangan dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut. Seorang hakim yang diwawancarai penulis menegaskan beliau tidak setuju dengan putusan hakim tersebut karena pendapat yang diadopsi oleh hakim yang memutus tersebut adalah tidak *rajih*. Sedangkan masih ada pendapat dari ulama' yang muktabar yang harus dijadikan sebagai panduan.¹⁴⁸ Beliau berpendapat, akan terjadi kerusakan yang

¹⁴⁷ Muhammad Mushthafa Syalabi, *Ahkam Al-Ushrah fi Al-Islam Dirasah Muqaranah Bain Al-Fiqh Al-Madzaib As-Suniyyah wa Al-Mazhab Al-Ja'fari wa Al-Qanun*, (Beirut : Dar An-Nahdah Al-Arabiyyah, 1977), Cet. ke-2, h. 697.

¹⁴⁸ Kamarul Azmi, (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Tanggal 18 Mac 2013.

nyata di masa akan datang ketika anak yang kurang enam bulan dalam kandungan ibunya sejak diakad nikahkan, dinasabkan kepada pria yang menikahi ibunya. Ini karena, anak yang dibin atau dibintikan kepada pria yang menjadi suami ibunya itu sudah pasti akan menuntut harta warisan bila sudah besar kelak sedangkan anak zina tidak bisa mewarisi harta pusaka ayahnya.¹⁴⁹

Alasan yang dibuat hakim tersebut mengkhawatirkan akan melahirkan masyarakat Islam yang rusak, punah dengan muncul banyaknya anak zina yang diakui nasabnya. Tampaknya, ia membuka kesempatan kepada masyarakat agar tidak merasa takut dalam hal menasabkan anak zina, karena ada peraturan dunia yang memungkinkan.

Kaidah fihiyyah *الضرر يدفع بقدر الامكان* yang bermaksud ‘segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin’ adalah bertepatan dalam membicarakan masalah ini. Segala mudharat yang akan timbul akibat dari putusan hakim tersebut harus dihindari sedapat mungkin agar masyarakat Islam khususnya dapat hidup aman dan damai berlandaskan syari’at Islam.

Sejatinya, penulis berpandangan, hakim memutuskan kasus tersebut hanyalah dengan menggunakan logik akal dan tidak berdasarkan pada nas-nas hukum Syara’. Penulis juga berpandangan dalam menyelesaikan kasus yang berat seperti ini, hakim harus melebihi seorang agar dapat menciptakan putusan yang benar, bertepatan dengan hukum Islam. Apabila hakim yang seorang memutuskan

¹⁴⁹ Kamarul Azmi, *Wawancara*, Tanggal 18 Mac 2013.

tidak sesuai hukum Syara', hakim yang lainnya dapat membantah dan memperbaiki kondisi tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan bab demi bab dalam pembahasan skripsi tentang aplikasi putusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu tentang pengesahan taraf atau nasab anak ditinjau menurut perspektif hukum Islam, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan :

1. Aplikasi putusan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu tentang permohonan pengesahan taraf anak tidak sesuai dengan hukum Syara' dan Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu karena bayi yang dilahirkan oleh responden tidak mencapai usia enam bulan dalam kandungan, terhitung sejak responden diakad nikahkan sehingga bayi tersebut dilahirkan. Hakim memutuskan anak tersebut dinasabkan kepada pemohon (suami) padahal anak tersebut berada di dalam kandungan hanya empat bulan 24 hari terhitung sejak orangtuanya diakad nikahkan sampai melahirkan. Tindakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dianggap sebagai satu tindakan yang menentang mahkamah dan melanggar kode etik sebagai seorang hakim.
2. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu telah memutuskan kasus permohonan pengesahan nasab anak kurang enam bulan tersebut berdasarkan kepada pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan yang mengatakan harus karena peraturan keduniaan. Peraturan keduniaan yang dimaksud

adalah dalam hal urusan sekolah, pendaftaran, nikah dan sebagainya. Sedangkan pendapat tersebut bukanlah pendapat yang *rajih* karena Dr. Abdul karim Zaidan bukanlah ulama' mujtahid dalam bidang Fiqh. Selain itu, menurut hakim tersebut ada kebaikan yang diperoleh hasil dari putusan tersebut di antaranya adalah menutup keaiban yang lalu atas perbuatan zina yang lampau, menghilangkan perasaan malu anak kerana tidak berbinkan ayahnya, dan membantu orangtua yang terlanjur membangun kehidupan yang baru.

3. Putusan hakim tersebut adalah merupakan hal yang sangat bertentangan dengan hukum Syara' dan akan menimbulkan mudharat yang besar pada masa akan datang dan tidak sesuai dengan kemauan hukum Syara'.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan di sini adalah sebagai berikut :

1. Para hakim hendaklah memutuskan sesuatu perkara berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan undang-undang agar tidak terjadi penyimpangan yang akan mengakibatkan kesalahpahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam.
2. Bagi Mahkamah Syariah, khususnya Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu agar mengembalikan fungsi Mahkamah Syariah sesuai dengan fitrah (Islam), bertindak tegas dalam mengadili setiap kasus yang ada di tengah masyarakat.

3. Hukum Islam yang ada haruslah diimplimentasikan sepenuhnya dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan nasab anak dan aplikasi Mahkamah Syariah harus dipatokan dengan hukum Islam agar peran lembaga Mahkamah Syariah sejalan menurut ketetapan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
4. Perhatian orang tua terhadap pergaulan anak-anak harus dipertingkatkan lagi, karena terjerumusny anak-anak remaja ke dalam perbuatan zina ini karena pengaruh pergaulan yang terlampau bebas di antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan.
5. Perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani perbuatan zina ini, khususnya bagi umat Islam. Dan bagi pihak penegak hukum hendaklah mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan pornografi, baik melalui media cetak maupun elektronik karena hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap mental masyarakat, anak remaja khususnya.
6. Dalam rangka mencegah masyarakat dari perbuatan zina, pemerintah hendaklah memperkuat lagi pencegahan terhadap perbuatan zina ini, walaupun di Malaysia khususnya dalam kesalahan jinayah syariah sudah ditetapkan sanksi perzinahan ini. Dan saran penulis kepada pemerintah agar enakmen atau *qanun* hudud dan *qishas* tersebut dapat dilaksanakan. Karena hukum Allah SWT saja yang mampu mencegah segala perbuatan zina ini. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat merasa takut untuk

melakukan perbuatan tersebut dan menjadi pelajaran. Dengan demikian, terciptalah suatu masyarakat yang bermoral, damai dan dengan keturunan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

“*Nasab – Wikipedia Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas*”, diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasab>.

“*Prematuritas, Buku Saku Dokter*”, diakses pada 12 Juni 2103 dari <http://www.medicastore.com>.

“*Sejarah, Geografi, Penduduk Malaysia*”. Diakses pada 24 Januari 2013 dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia_files/ads_002.html.

Abd. Wahid, Mohd Tamyas, *Anak Tak Sah Taraf Mengikut Hukum Syara'*, (Selangor : Golden Book Center Sdn. Bhd, 2008).

Abdurrahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fikih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

Abidin, Ibnu, *Raddi Al-Muhtar 'Ala Durri Al-Muhtar*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1992), jilid 2.

Abu Al-Ainain Badran, Badran, *Huquq Al-Aulad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun*, (Iskandariah : Muassasah Syabab Al-Jamiah, tth).

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Lebanon, 1996) jilid 2.

Abu Habib, Su'di, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Ishtilaahan*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), Cet. ke-2.

Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruqhutni*, (Kaherah : Dar Al-Mahasin li At-Tiba'ah, 1996), jilid 3. Asy-Syarbasi, Ahmad, *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*, (Beirut : Dar Al-Jayl, 1977), Cet. Pertama, jilid 5.

Ahmad, Che Maryam, *Syariah dan Undang-undang : Satu Perbandingan*, (Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 2004).

Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tth), jilid 7.

Al-Bugha, Musthafa, *Syarah Riadush Shalihin*, (Jakarta : Gema Insani, 2010),
Cet. Pertama, jilid 3.

Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), Cet.
Pertama, jilid 5.

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), jilid 13.

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1982), jilid 6.

As-Siba'i, Mushtafa, *Syarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (Damaskus :
Mathba'ah Jami'ah, 1972), Cet. ke-5, jilid 1.

Data Putusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu, No. Kasus
11300-006-0033-2012. Tahun 2012, 7 Agustus 2012.

Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, (Terengganu : Percetakan
Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004).

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terengganu 2001, (Terengganu :
Percetakan Nasional Berhad Cawangan Terengganu, 2001).

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2000 (Warta Kerajaan Negeri
Kelantan).

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam
Terengganu 1985, Pasal 109.

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam
Terengganu 1985, Pasal 109, *Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu
2001*, (Terengganu : Percetakan Nasional Malaysia Berhad Cawangan
Terengganu, 2001).

Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1997) Cet.

Pertama, jilid 4.

Ensiklopedia Islam, (Jakarta : Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1990) Cet. Pertama, jilid

4.

Government of Terengganu, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, (Terengganu :

Kuala Terengganu, 2004), jilid 57.

Hadis Shahih, *Al-Bukhari* (6818) dan *Muslim* (1458).

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tth),

jilid 9.

[http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/penamaan-anak-tak-sah-taraf-anak-](http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/penamaan-anak-tak-sah-taraf-anak-luar-nikah)

luar-nikah. Diakses pada 8 April 2013.

Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan*

Hukum Positif, (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005), Cet. ke-2.

Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ath-Thalaq*, (Beirut : Dar Ash-Sha'bi,

t.t).

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, *Pengenalan Ringkas Jabatan*

Kehakiman Negeri Terengganu, (Terengganu : Kuala Terengganu, 1992).

Kamarul Azmi, (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu),

Wawancara, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Tanggal 18 Mac

2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet. Pertama.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (tt : Dar Al-'Ilm, 1987), Cet. ke-12.

Khurafah, Ala'uddin, *Syarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (Baghdad : Matba'ah Al-Ma'arif, 1963) jilid 2.

Ma'luf, Luis, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut : Dar Al-Masyriq, 1977), Cet. ke-2.

Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 24 Januari 2013.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1985).

Muhammad, Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), jilid 8.

Musa, Muhammad Yusuf, *An-Nasab wa Atsaruh*, (Kaherah : Dar Al-Ma'rifah, 1967), Cet. ke-2.

Nasir, Yasin, *Tsubut An-Nasab*, (Jeddah : Dar Al- Bayan Al-Arabi, 1987), Cet. Pertama.

Nasron, Noor Aini, (Respondan), *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2013.

Nor Hafizah, (Penolong Pegawai Syariah), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Tanggal 26 Februari 2013.

Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012).

Papan Tanda, Lantai Dasar, Mahkamah Syariah Terengganu, Terengganu.

Pasal 85 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaysia.

Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Al-Qahirah : Maktabah Wahab, 1980), Cet. ke-4.

_____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terjemahan Oleh Mu'ammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007).

- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), jilid 9.
- Rafiah, Salim, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998).
- Rahmat, Mansur, *Pengiktirafan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu*, (Terengganu : Cetak Ilmu Sdn. Bhd, 2001).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Semarang : Toha Putera,tth), jilid 2.
- Sabariah, Sambak, *Pengaruh Penjajahan*, (Terengganu : Percetakan Nasional Berhad, 2004).
- Sanusi, Shahroni, *Pendaftaran Mahkamah Seksyen Shah Alam*, (Selangor Darul Ehsan : Pustaka Seri Intan SDN. BHD, 1999).
- Sayyid, Abdul Rahman, *Bughyat al-Mustarshidin*, (Darul Fikr, t.t).
- Siti Zulaika, Mohd. Nor, *Perlindungan Kanak-kanak Dalam Islam : Perlaksanaannya Menurut Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Puataka, 1971).
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, , Agustus 2006), Cetakan ke-13.
- Syahrul, Zaman, *Zaman Pra-Sejarah Negara*, (Kuala Lumpur : TATI Education, 2002).
- Syalabi, Muhammad Mushthafa, *Ahkam Al-Usrah fi Al-Islam Dirasah Muqaranah Bain Al-Fiqh Al-Madzahib As-Suniyyah wa Al-Mazhab Al-*

Ja'fari wa Al-Qanun, (Beirut : Dar An-Nahdah Al-Arabiyyah, 1977), Cet. ke-2.

Taimiyyah, Ibnu, *Majmuk Fataawa*, (Lebanon : 1994), jilid 32.

Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan), 1984, Pasal 84 (1) dan (2), Undang-undang Malaysia, Akta 303.

Yahya, Ismail, (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kasus pengesahan taraf anak), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Tgl 26 Februari 2013.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufasssol fi Ahkamil Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'atil Islamiyyah*, (Beirut, Lebanon : 1417H/1997M), jilid 9.

Zainal Abidin, Mohd Asri, *Nasab : Kandungan Kurang Enam Bulan*, (Perlis : Pustaka Abadi, 2011).

Zaman Penjajahan, Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, diakses pada 5 Januari 2013.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Terjemahan Oleh Ahmad Shahbani Salamon, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), jilid 7.

_____, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986), Cet. Pertama, jilid 7.

_____, Diterjemah Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 10.